



MINGGU II NOVEMBER 2023

• TABLOID

REFERENSI PEMILU 2024 •

info indonesia

Harga @Rp 20.000,-

JOKOWI KAWAL PRABOWO-GIBRAN



▶ PRABOWO
TETAP PROJO

▶ KADER NASDEM
BANGGA
PUNYA
ANIES-
MUHAJIRIN

▶ DANA PEMILU
HARUS HALAL

▶ SUMSEL
LADANG
SUARA
RELIGIUS
AMIN OPTIMISTIS
MENANG

▶ JANJI
AHMAD
SAHRONI
UNTUK DKI
JAKARTA

▶ ATUR
STRATEGI
RIDHO
RAHMADI
TURUN
GUNUNG



Road to
Election
2024



▶ GERINDRA
PASTI SALIP
PDIP

“Untuk Projo, ada atau tidak adanya Projo di TPN, kami amat bertanggung jawab memenangkan pasangan ini (Prabowo-Gibran) satu putaran”

Surokim Abdussalam



Netralitas Semu

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) resmi memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena dinilai melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran yang paling disorot adalah meloloskan Gibran Rakabuming Raka agar bisa dicalonkan sebagai cawapres di Pilpres 2024.

Keputusan itu dianggap konyol karena terlalu dipaksakan. Berbagai tuduhan negatif dilontarkan ke Mahkamah Konstitusi hingga ada yang mengubah namanya jadi Mahkamah Keluarga.

Meski demikian, Anwar Usman sepertinya sudah bulat untuk meloloskan sang keponakan yang tak lain putra sulung Presiden Joko Widodo. Hasilnya, Gibran Rakabuming Raka jadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Keputusan ini juga menyinggung PDIP karena Gibran dan Jokowi adalah kader partai. Apalagi, PDIP juga sudah menetapkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres dan cawapres.

Konflik pun terlihat semakin melebar hingga mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Banyak yang menilai Jokowi tidak akan netral di Pilpres 2024 karena secara logika tidak ada ayah yang membiarkan anaknya gagal.

Presiden Jokowi merespons tuduhan tersebut dengan menggelar makan siang bersama ketiga capres, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Namun, sekali lagi, ini hanya sebuah netralitas semu yang dihadirkan Jokowi di Pilpres 2024. Di sisi lain, Jokowi yang tak lain adalah kader PDIP harus berseberangan dengan Megawati. Konflik itu semakin tajam dengan masuknya anak Jokowi, Kaesang Pangarep, sebagai Ketua Umum PSI yang secara terang-benderang mendukung saudaranya Gibran Rakabuming Raka di Pilpres tahun depan.

Ternyata, bukan hanya tim Ganjar-Mahfud yang meragukan sikap netral Jokowi di Pilpres 2024, tim Anies-Cak Imin juga menyampaikan keraguan yang sama.

Keraguan itu ada pada penyelenggara pemilu, pegawai pemerintah serta aparat keamanan yang diperkirakan lebih condong pada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi dan para pembantunya.

Netralitas yang digaungkan masih semu dan abu-abu. Sehingga baik tim AMIN dan Ganjar-Mahfud meragukan hal tersebut.

Di sisi lain, pemerintah juga berusaha untuk membuktikan kalau mereka netral. Semua ASN diminta untuk tidak memberikan dukungan apapun kepada seluruh calon peserta Pemilu 2024 dalam bentuk apapun.

Bahkan, para ASN ini mendapat pengawasan ketat. Hanya saja belum bisa dibuktikan apa mereka memang puas atau tidak.

Terkait soal netralitas ini, kami sajikan secara khusus di Tabloid Info Indonesia edisi kali ini.

Ada banyak sajian menarik lainnya yang kami sampaikan di edisi kali ini. Salah satunya persaingan Ganjar dan Prabowo yang sama-sama berebut simpati mendulang suara masyarakat Jawa di luar Pulau Jawa.

Secara kultural, Ganjar dan Prabowo sama-sama punya potensi meraih suara dari warga Jawa di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi.

Bagaimana kondisinya, bisa dibaca pada edisi kali ini. Sedangkan, peluang Anies juga cukup besar dengan catatan harus memaksimalkan seluruh kader dari partai koalisi. Tanpa ada dukungan kuat, maka hasilnya akan terasa sisa-sisa.●



info indonesia INOVASI UNTUK NEGERI

INFOINDONESIA.ID adalah media massa cetak di bawah payung
PT. DUA SATU PRO
Sertifikat Dewan Pers
Nomor 969/DP-Verifikasi/K/III/2022

PENDIRI/ DIREKTUR : Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Adam Aulia Manzanl Khan **PEMIMPIN REDAKSI**: Rusdiyono **WAKIL PIMPINAN REDAKSI**: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irmayani **REDAKTUR**: Rio Taufiq Adam, Fonda Lapod, Rusdy Setiawan Putra, Irmayani, Rusdiyono, Nina Erlina

REPORTER: Nefri, Indra Hadi, Pahmi Ramadhan, Moehamad Moeslim, Sadam M, Hardi Aar, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Andyanto, M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir

EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles **TATA LETAK**: Sujatmiko **MEDIA SOSIAL**: Haidir Ali

KEUANGAN : Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI**: Nur Aisah **PENGEMBANGAN BISNIS**: M. Iqbal, Zul Fahmi **ADMINISTRASI**: Ega Tri Gustina

DISTRIBUSI: Abdul Muchtar

HARGA IKLAN: 1 Halaman ukuran 290 mm x 420 mm Rp.25.000.000,-include PPN 11 %.

1/2 Halaman ukuran 145 mm x 210 mm Rp. 12.500.000,-

BANK ACCOUNT: *A/N : PT. DUA SATU PRO, BCA: No.Rek: 5530682121 KCP Otista Jakarta Timur **ALAMAT REDAKSI/IKLAN/**

PEMASARAN: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750 **TELP** 021-791 96781 **FAX** 021-791 96786 **PALEMBANG** Jalan Puncak Sekuning Lorong Sahabat No 2 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I

Palembang 30126 **TELP** : 0711-7442344



“Ke mana dukungan Pak Jokowi mestinya Projo ada di situ”

Surokim Abdussalam

PRABOWO TETAP PROJO

Relawan Pro Jokowi (Projo) telah menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024.

Dukungan yang diberikan Projo terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pastinya dinilai sangat penting. Sebab, Projo merupakan organisasi yang memiliki massa pendukung yang cukup banyak. Maka dari itu, dukungan tersebut akan berpengaruh terhadap pasangan Prabowo-Gibran.

Maka tidak heran, beberapa pengurus Projo terdaftar kedalam struktural Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Salah satu pengurus Projo yang tergabung di TKN adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Presiden (Bappilpres) Projo, Panel Barus.

“Panel Barus sebagai Wakil Ketua Koordinator Strategis,” kata Sekretaris TKN, Nusron Wahid, kepada wartawan di Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin, 6 November 2023.

Panel Barus menjelaskan, pembentukan struktural TKN Prabowo-Gibran sudah melalui proses yang begitu panjang. Dia menyampaikan bahwa pasangan Prabowo-Gibran bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan dan tantangan yang sedang dihadapi Bangsa Indonesia.

Direktur Rumah Indonesia Maju (RIM) itu merasa memiliki tanggung jawab untuk bisa memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

“Kami merasa amat bertanggung jawab untuk memenangkan pasangan ini. Pasangan ini menurut pandangan kami adalah pasangan yang mampu menjawab tantangan ke depan,” kata Panel.

Selain itu, Panel bakal berupaya untuk memenangkan Gibran satu putaran. Panel mengatakan, bertanggung jawab penuh atas kemenangan pa-

sangan Prabowo-Gibran.

“Untuk Projo, ada atau tidak adanya Projo di TPN, kami amat bertanggung jawab memenangkan pasangan ini satu putaran,” ujar Parnel.

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyampaikan, pihaknya akan berusaha menggerakkan kader-kadernya di seluruh provinsi di Indonesia untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Projo menargetkan Prabowo-Gibran menang satu putaran di Pilpres 2024.

“Pokoknya satu putaran. Doakan bersama rakyat. Ya udah itu aja,” ungkap Budi Arie.

Dia memastikan, Projo akan tetap bersama dan mendukung penuh Prabowo-Gibran. Dia menyatakan, Projo di daerah telah sepakat satu suara. Budi Arie menegaskan, Projo akan turun ke masyarakat untuk menyosialisasikan program dan visi-misi dari pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) tersebut.

“Kami melakukan konferensi daerah, di seluruh provinsi di Indonesia, dan menyimpulkan seluruh pendukung Projo ini solid, bulat, militan, untuk mendukung Pak Prabowo (sebagai) Presiden Indonesia,” ujar Budi Arie.

Menteri Komunikasi dan Informatika itu menyampaikan, Projo mengharapkan dukungan masyarakat di seluruh Indonesia untuk bisa ikut serta dalam memenangkan Prabowo-Gibran di kontestasi 2024.

“Enggak, enggak ada yang berat. Seluruh rakyat dukung. Ya semuanya se-luruh Indo-ne-

sia. Ini kan pilpres bukan satu provinsi dong. Semuanya udah, kita berharap rakyat punya kebijaksanaan,” kata Budi Arie.

Dia mengatakan, Pilpres merupakan ajang masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilihnya dalam menentukan figur yang dapat dipercaya untuk memimpin bangsa ini di masa mendatang.

Selain itu, Budi Arie juga tidak mempersoalkan adanya kader Projo yang memberi dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Kita yakin. Ini kontestasi pilpres, kan memilih figur. (Ada yang mendukung Ganjar Pranowo?) Ya biar aja, enggak apa-apa. Tapi saya yakin kok. Kan kita tahu hati nurani rakyat,” ujar Budi Arie.

Peneliti Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, menilai, Relawan Projo akan setia bersama Presiden Jokowi. Meskipun selama dua kali pemilu, Projo lebih dekat dekat PDIP.

Maka dari itu, Surokim menilai, Projo tidak akan sepenuhnya mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Adapun Projo juga akan memberikan kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di kontestasi 2024.

“Secara institusi organisasi Projo akan mengikuti arah dukungan Pak Jokowi. Tetapi ada sejarah panjang di mana Projo selama ini berkolaborasi dengan PDIP mendukung Jokowi dalam dua pemilu, pasti punya chemistry. Sehingga, tidak otomatis strike tegak lurus, tentu masih ada split yang akan mendukung paslon dari PDIP,” kata Surokim.

Dia menilai, Relawan Projo merupakan salah satu organisasi yang cukup militan dalam memberikan dukungan. Hal itu

terlihat ketika dua kali Pilpres, Projo mendukung Jokowi. Hasilnya, Jokowi bisa menang dua periode di pilpres.

“Ya sejauh ini Relawan Projo termasuk yang militan jika ada penguatan dari Pak Jokowi tentu akan bisa signifikan dan solid,” kata Surokim.

Kendati begitu, Surokim menyakini jika Presiden Jokowi tidak memberikan penguatan, maka dukungan Projo berpotensi akan terbelah.

“Tetapi, jika belum ada penguatan dari Pak Jokowi. Saya pikir potensi pendukung untuk terbelah masih tinggi karena faktor sejarah tadi,” jelas Surokim.

Lebih lanjut, Surokim mengatakan, secara kelembagaan seharusnya Projo bisa konsisten dan tidak pindah-pindah dalam memberikan dukungan politiknya.

“Ke mana dukungan Pak Jokowi mestinya Projo ada di situ,” kata Surokim.

Surokim menyampaikan, dalam politik tidak selalu bicara mengenai kalkulasi secara matematis, begitu juga soal arah dukungan politik. Dukungan itu bisa saja berubah jika kepentingannya tidak diakomodir.

“Bisa berubah-ubah tergantung dari akomodasi kepentingannya seberapa jauh bisa diakomodasi,” ujar Surokim.

Surokim menilai, Relawan Projo pastinya akan mengikuti langkah politik dari Presiden Jokowi di 2024. “Tapi kalau melihat arah dukungan Pak Jokowi saya pikir Projo akan istiqomah sesuai arahan Pak Jokowi,” kata Surokim.

Surokim berpendapat, Projo tidak akan membelot dari Prabowo-Gibran. Kendati begitu, dukungan dapat berubah di tataran akar rumput.

“Kalau membelot enggak lah, potensi untuk seperti terbelah di grassroot masih terbuka dan ada sepanjang enggak ada penguatan Pak Jokowi,” tandas Surokim. •RDO



“Putusan MKMK akan ciptakan sentimen negatif pada pencapresan Prabowo-Gibran. Tapi, tidak bisa mengalahkan tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi”

Subiran Paridamos



KETUA MK JADI TUMBAL GIBRAN TETAP MAJU

Anwar Usman resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Majelis Kehormatan MK. Namun, putusan itu tak membuat status Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju dibatalkan.

Hingga batas akhir penggantian capres dan cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 8 November 2023, Prabowo Subianto tetap akan bersama dengan Wali Kota Solo itu. Meski sempat mencuat isu putra sulung Presiden Joko Widodo itu bakal digantikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

Di sisi lain, MKMK menyatakan Anwar Usman, yang tak lain adalah paman dari Gibran, terbukti melakukan pelanggaran berat terkait dengan Putusan MK Nomor 90 yang mengubah syarat batas usia capres dan cawapres.

“Memutuskan. Satu. Hakim Terlapor (Anwar Usman) terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepastian dan kesopanan,” kata Ketua MKMK, Jimly As-shiddiqie, saat membacakan putusan, Selasa,

7 November 2023.

“Dua. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim terlapor,” sambung Jimly.

MKMK juga memerintahkan Wakil Ketua MK untuk melakukan rapat pleno untuk memilih Ketua MK yang baru. “Tiga. Memerintahkan Wakil Ketua MK dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru,” ujar Jimly.

Tidak hanya itu, MKMK juga memberikan sanksi kepada Anwar Usman untuk tidak lagi terlibat dalam persidangan yang berkaitan dengan perkara Pemilu yang berpotensi memiliki konflik kepentingan.

Selain itu, Jimly menegaskan bahwa MKMK tidak memiliki kewenangan untuk menilai putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. “Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,” kata Jimly.

Sementara itu, Anggota MKMK, Wahiduddin Adams, berpendapat MKMK memiliki wewenang untuk menjaga kehormatan, kode etik, dan perilaku hakim.

“Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 1 angka 4 PMK 1/2023, Majelis Kehormatan merupakan perangkat yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta kode etik dan perilaku hakim konstitusi,” ucap Wahiduddin.

“Akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman

sekali melabrak sifat final dan mengikat putusan MK,” tambah Wahiduddin.

Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, menilai, putusan MKMK pastinya akan memiliki dampak yang negatif bagi pencapresan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

“Putusan MKMK akan ciptakan sentimen negatif pada pencapresan Prabowo-Gibran. Tapi, tidak bisa mengalahkan tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi,” kata Subiran kepada Info Indonesia, Kamis, 9 November 2023.

Subiran mengatakan, MKMK tidak punya kewenangan untuk menganulir putusan MK karena akan melanggar Undang-Undang. Sebab, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

“Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding) (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 8/2011,” kata Subiran.

Dia mengatakan, meskipun tidak bisa membatalkan putusan MK terkait batas usia minimal capres-cawapres, akan tetapi putusan MKMK tersebut akan berdampak negatif bagi pencapresan Prabowo-Gibran, bahkan kepada Presiden Jokowi.

“Putusan MKMK tersebut

tentu menciptakan sentimen negatif kepada Prabowo-Gibran dan politik dinasti Jokowi,” jelas Subiran.

Dia menyampaikan, jika sentimen negatif tersebut terus dimainkan untuk melemahkan pasangan Prabowo-Gibran, maka akan berdampak panjang bagi duet tersebut. Bahkan, akan mempengaruhi suara pasangan tersebut di Pilpres 2024.

“Jika ini terus didengungkan oleh media dan masyarakat sipil, maka sentimen negatif publik ini akan menjelma menjadi common enemy atau musuh bersama dari semua pihak. Sehingga lawan bertanding Prabowo-Gibran di pilpres bukan hanya Ganjar-Mahfud dan Anies Muhaimin, tapi juga sentimen negatif publik tersebut,” tutur Subiran.

Tidak hanya itu, isu tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk menurunkan Presiden Jokowi dari kursi RI-1. Sebab, masyarakat sudah terlanjur kecewa dengan sikap Presiden Jokowi yang terkesan membiarkan konstitusi diabrak-abrik.

“Jangan sampai isu ini digiring untuk menggaungkan isu-isu pemakzulan kepada Presiden Jokowi. Dengan alibi bahwa Presiden membiarkan konstitusi dilanggar oleh hakim MK untuk menggejolakkan kepentingan politik Gibran untuk maju cawapres,” kata Subiran.

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu mengatakan, jangan sampai isu Presiden Jokowi melakukan pembiaran tersebut dianggap benar oleh masyarakat. Hal itu pun diperkuat dari putusan MKMK yang menilai Anwar Usman telah melakukan pelanggaran berat dan menyalahi kode etik hakim konstitusi.

“Artinya, ada masalah dengan putusan MK tentang batas minimal usia capres beberapa waktu lalu,” ujar Subiran.

Dia menyampaikan, Presiden Jokowi masih akan menjabat sekurang-kurangnya satu tahun. Maka dari itu, kata Subiran, Presiden Jokowi masih memiliki bargaining yang sangat kuat.

“Jadi kekuatan politiknya masih kuat dan loyalisnya baik melawan maupun grassroot masih cukup kuat,” tutur Subiran.

Dikatakan Subiran, penggiringan isu pemakzulan Presiden Jokowi di sosial media dan media massa hanya dikonsumsi segelintir elite dan masyarakat kelas menengah ke atas, plus kelompok masyarakat dan akademisi.

Sementara itu, lanjut Subiran, massa di akar rumput yang tidak terpengaruh dengan sosmed dan media massa masih cukup banyak.

“Artinya apa? Penggiringan isu untuk menciptakan sentimen negatif kepada Presiden Jokowi agar menggerus elektoral Prabowo-Gibran itu tidak berpengaruh besar. Loyalis Presiden Jokowi yang bergeser hanya mereka yang terafiliasi dengan PDIP, itupun tidak semuanya,” tandas Subiran.

•RDO





“Ganjar diyakini menyadari PDIP bukan saja semata perlu melekatkan kembali hubungan dengan Nahdlatul Ulama (NU), tetapi mesti pula memperoleh simpati besar dari masyarakat kita yang mayoritas Islam”

Efriza

GANJAR SEMAKIN MELEJIT

Ganjar Pranowo terus melakukan safari politik ke beberapa tokoh dan ulama di daerah. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga sowan ke tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU).

Diyakini safari politik yang dilakukan Ganjar Pranowo itu akan meningkatkan elektabilitas. Selain itu, jelang hari pencoblosan, elektabilitas Ganjar Pranowo diprediksi akan semakin melejit meninggalkan kompetitornya.

Analisis politik Citra Institute, Efriza, menjelaskan, safari politik yang dilakukan Ganjar Pranowo ke beberapa daerah, terutama ke tokoh NU, merupakan upayanya untuk menarik simpati dari kelompok Islam. Tidak hanya itu, Ganjar Pranowo juga ingin menarik suara dari masyarakat umum yang mayoritas Islam.

“Ganjar diyakini menyadari PDIP bukan saja semata perlu melekatkan kembali hubungan dengan Nahdlatul Ulama (NU), tetapi mesti pula memperoleh simpati besar dari masyarakat kita yang mayoritas Islam,” kata Efriza kepada Info Indonesia, Sabtu, 11 November 2023.

Pendekatan yang dilakukan Ganjar Pranowo ke kelompok Islam, kata Efriza, adalah untuk mengeruk basis Islam. Sebab, kelompok Islam ini menjadi basis utama dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Maka dari itu, penting bagi Ganjar Pranowo untuk mendekatkan diri ke kelompok Islam guna memecah suara mereka.

“PDIP dan Ganjar menyadari lawan terkuat dengan kekuatan basis Islam dan isu Islam adalah Anies-Imin. Anies tentu saja paling mendapatkan respons besar dari pemilih sosiologis. Melihat fenomena keterpilihan dirinya pada Pilkada DKI 2017,” jelas Efriza.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang itu menuturkan, Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tentunya membutuhkan kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi pilpres yang diprediksi akan berjalan dua putaran. Kekuatan yang dimiliki Mahfud MD, PPP, Partai Hanura, Partai Perindo, dinilai belum cukup. Oleh

karena itu, Ganjar Pranowo harus terus melakukan safari ke seluruh daerah di Indonesia guna menggaet suara-suara yang sulit dijamah pasangan lain. Selain itu, Efriza juga menyarankan kepada Ganjar Pranowo untuk sowan ke para pendiri pesantren yang ada di Indonesia.

Efriza menyampaikan, pengaruh dan dukungan yang diberikan kiai dan para pendiri pesantren sangat berpengaruh besar. Sebab, pengikut para kiai pastinya akan satu suara. Jadi, kata Efriza, hal itu sangat menguntungkan Ganjar Pranowo jika memiliki kedekatan

dengan para ulama atau pendiri pesantren.

“PDIP oleh sebab itu tak hanya membutuhkan PPP, Mahfud MD, maupun mematok wilayah Jawa Timur untuk harapan meraup perolehan suara. Tetapi, juga melakukan silaturahmi ke daerah-daerah, khususnya kunjungan ke berbagai pondok pesantren,” ujar Efriza.

Dia menilai, Ganjar Pranowo terlihat sudah memahami lingkungan yang berada di pesantren. Ini, kata Efriza, akan semakin memudahkan Ganjar Pranowo untuk mendekatkan diri kepada para pendiri pesantren. Selain itu, Ganjar Pranowo akan semakin mudah untuk mendapatkan dukungan dari lingkungan pesantren.

“Ganjar memahami pola perilaku di lingkungan pesantren masih mayoritas merujuk kepada pilihan kiai. Sehingga, pilihan santri lebih banyak didasari atas arahan dari kiai,” ujar Efriza.

“Tak dipungkiri santri masih menjadikan acuan pandangan kiai sebagai faktor utama sebagai preferensi dalam memilih. Sehingga, tak juga salah jika dianggap perilaku memilih santri masih dimobilisasi juga tidaklah salah,” kata Efriza menambahkan.

Efriza berpendapat, safari politik ke kelompok Islam ataupun ulama menjadi langkah yang terbaik bagi Ganjar Pranowo. Hal itu untuk menguatkan barisan dukungan dari Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

“Oleh sebab itu, mendekati kiai, membangun komunikasi dengan kalangan kiai, ulama, santri, adalah pilihan terbaik bagi PDIP agar tidak terulang lagi kekalahan memalukan bagi PDIP seperti DKI Jakarta,” kata Efriza.

Apalagi, keluarga besar dari istri Ganjar Pranowo,

Siti Atikoh, merupakan salah satu pengurus sejumlah pondok pesantren terkenal di Jawa Tengah. Maka, Ganjar Pranowo akan berupaya sekuat tenaga agar dukungan dari basis Islam semakin menguat kepada dirinya.

“Ini menunjukkan PDIP memang berusaha menggarap unsur Islam agar tidak kalah dari Anies sendiri, maupun PKB dan PKS yang memang partai berideologi Islam untuk memenangkan Anies,” kata Efriza.

“Ini adalah strategi politik dari PDIP untuk menyasar pemilih yang masih mengedepankan isu sosiologis seperti agama sebagai basis dalam memilih calon,” ujar Efriza.

Dia menyampaikan, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ingin berupaya mengalahkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan merebut suara dari kelompok Islam.

“Jadi untuk berusaha mengimbangi Anies-Imin maka yang digarap oleh PDIP sebagai prioritas adalah unsur Islam,” kata Efriza.

Dikatakan Efriza, jika pemilu berideologi nasionalis seperti PDIP sudah sangat mengakar sebagai partai lama. Maka dari itu, PDIP melalui capresnya harus kembali membangun komunikasi dengan para petinggi kelompok-kelompok keagamaan, termasuk kelompok Islam.

“Sehingga untuk tujuan tersebut dilakukan safari politik ke pondok-pondok pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah,” kata Efriza.

Sedangkan, untuk mengimbangi kekuatan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabming Raka di Pilpres mendatang, PDIP melakukan serangan dengan gencar yang menyerang Jokowi dan Gibran melalui narasi perilaku menyimpang mereka dari sifat mereka yang tamak akan kekuasaan.

Hal itu sudah terlihat ketika Gibran Rakabuming Raka didapuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Apalagi, PDIP kini sudah secara terang-terangan menyerang Gibran Rakabuming Raka sebagai kader yang tidak loyal terhadap partai yang sudah membesarkannya selama ini.

“Seperti narasi yang dibangun oleh PDIP, misalnya pengkhianat, perilaku penguasa politik mengabaikan konstitusi, dan sebagainya,” tandas Efriza.

•RDO



"Anies enggak punya basis partai dan Anies bukan kader partai. Itu menjadi faktor turunnya elektabilitas atau survei Anies turun"

Hari Purwanto



AMIN SUDAH DIPASTIKAN KALAH OLEH LEMBAGA SURVEI

Pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selalu menempati urutan paling buncit dalam survei elektabilitas terhadap tiga kandidat yang akan bersaing di Pilpres 2024. Hal ini menjadi indikasi duet AMIN bakal kalah di putaran pertama pesta demokrasi tahun depan.

Dalam survei yang dilakukan Poltracking Indonesia, pasangan Anies-Cak Imin hanya memiliki elektabilitas 23,7 persen di kalangan pemilih NU. Sementara, Prabowo-Gibran di posisi teratas dengan elektabilitas 42,4 persen, diikuti Ganjar-Mahfud 30,4 persen.

Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin tidak mau ambil pusing dengan hasil survey tersebut. Dia lebih menyerahkan seluruhnya kepada lembaga survei. Sebab, hasil survei bagi pasangan AMIN menjadi cambukan untuk bekerja keras.

"Ya itu terserah. Terserah yang nyurvei saja lah," kata Cak Imin sembari tertawa ditemui di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu, 11 November 2023.

Wakil Ketua DPR itu menyatakan tidak ingin mempersoalkan hasil survei yang menempatkan pasangan AMIN di posisi terakhir. Disampaikan Cak Imin, hasil survei tersebut menjadi masukan bagi pasangan AMIN untuk melakukan evaluasi agar lebih baik lagi.

Hasil survei Poltracking Indonesia merekam pilihan warga Nahdlatul Ulama (NU) di Pilpres 2024. Hasilnya, warga NU paling banyak memilih pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dengan basis suara warga NU sekitar 51,3 persen, 42,4 persen merupakan pemilih Prabowo-Gibran. "NU dengan populasi 51,3 persen pertama ke Prabowo-Gibran," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, saat pemaparan survei secara daring, Jumat, 10 November 2023.

Pasangan Ganjar-Mahfud di urutan kedua yang paling banyak dipilih warga NU dengan angka 30,4 persen. Sementara, Anies-Muhaimin di urutan ketiga dengan angka 23,7 persen.

Hanta Yuda menjelaskan bahwa angka ini memperlihatkan tidak ada yang dominan di antara pemilih dari basis Nahdlatul Ulama. "Ini data tersebar tidak ada yang dominan tidak ada yang lemah," jelasnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga merespons terkait pernyataan Nurson Wahid yang menyebut dirinya kurang NU. Kendati begitu, Cak Imin ogah menimpalkan pernyataan dari politisi Partai Golkar tersebut. "Tanggapannya cuma satu, EGP. Emang Gue Pikirin," kata Cak Imin.

Sebelumnya, Nurson menyatakan bahwa Cak Imin tidak pernah menjadi pengurus PBNU. Dikatakan Nurson Wahid, Cak Imin

hanya pernah menjadi bagian dari Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), kala itu Cak Imin menjadi ketua umum. Selain itu, Cak Imin juga pernah bergabung dengan GP Ansor.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai, kekalahan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di survei dinilai sebagai buah simalakama. Sebab, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar masih tersandera kasus yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, Anies memiliki rekam jejak politik yang sedikit hitam yakni memainkan isu agama pada Pilgub DKI Jakarta.

"Karena Anies masih tersandera kasus Formula E. Kedua, identitas Anies terhadap penggunaan kampanye pada saat menang Pilgub DKI Jakarta," kata Hari kepada Info Indonesia, Sabtu, 11 November 2023.

Menurut Hari, langkah Koalisi Perubahan yang memasangkan Cak Imin dengan Anies Baswedan merupakan keputusan yang cukup cemerlang. Dikatakan Hari, setidaknya Cak Imin bisa meredam isu-isu yang mengarah ke Anies. "Artinya, karena dukungan cawapres NU (Cak Imin) itu yang menjadi jalan tengah," kata Hari.

Dia menilai, kalahnya Anies di beberapa survei menunjukkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak memiliki basis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Apalagi, basis dari NU. Anies, tidak memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh NU. Maka sangat wajar bila surveinya sangat rendah.

"Artinya tidak punya basis secara provinsi," ujar Hari.

Faktor yang sangat mempengaruhi adalah Anies bukan orang partai. Sehingga, sulit bagi Anies untuk mendapatkan efek elektoral. Hal ini membuat basis dukungan dari partai kepada Anies tidak be-

gitu kuat.

"Anies enggak punya basis partai dan Anies bukan kader partai. Itu menjadi faktor turunnya elektabilitas atau survei Anies turun," kata Hari.

Dia menyampaikan, safari politik yang dilakukan Anies dan Cak Imin ke beberapa daerah akan sangat percuma. Sebab, Anies tidak memiliki basis partai yang kuat.

Hari menilai, dukungan yang besar terhadap pasangan AMIN itu karena peranan dari Cak Imin. Sebab, Cak Imin merupakan ketua umum partai dan memiliki jabatan yang sangat strategis di DPR.

"Safari politik yang dilakukan ini kan karena kerja-kerjanya Cak Imin," kata Hari.

Dikatakan Hari, faktor Cak Imin sangat penting bagi Anies. Sebab, Cak Imin yang memiliki basis pendukung yang sangat besar. Apalagi, Cak Imin sangat diidentikan dengan NU. Tidak hanya itu saja, Cak Imin juga memiliki kedekatan dengan para Kiyai NU.

"Cak Imin faktor penentu bagi Anies," ujar Hari.

Kendati begitu, Hari menilai, Cak Imin nampaknya ingin menjadi NU sebagai alat politiknya. Hari mengatakan, tokoh-tokoh NU tidak hanya berada di PKB karena banyak yang bergabung ke partai lain.

"NU tidak bisa identik di PKB. Banyak tokoh NU itu di partai lain," kata Hari.

Hari menyampaikan, Cak Imin ingin menjadikan PKB sebagai kendaraan politik para warga NU. Namun, hal itu nampaknya sangat sulit untuk terwujud. Pasalnya, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf sudah memperingatkan kepada seluruh warga Nahdliyin untuk tidak ikut dalam politik praktis.

"NU mau diarahkan ke PKB sebagai alat politik," tandas Hari. ●RDO





“Untuk Pemilu 2024, seluruh ASN di Sumsel wajib netral. ASN bertugas di birokrasi pemerintahan, tidak boleh ikut dalam politik praktis”

Agus Fatoni

INFO
PILEG

Minggu II • November 2023

7

PENYELENGGARA HARUS JAGA NETRALITAS PEMILU 2024

Sistem demokrasi Indonesia sudah semakin membaik meski ada beberapa catatan buruk yang harus dibenahi. Salah satunya adalah netralitas dari penyelenggara Pemilu yang lebih mengutamakan kepentingan penguasa. Sehingga meski pemerintah terus mengedepankan sikap netral namun sebagian pihak masih meragukannya.

Penyelenggara Pemilu 2024 dilaksanakan 14 Februari 2024 juga harus menjaga semua faktor masalah tiba-tiba timbul. Salah satu potensi masalah sering timbul adalah netralitas.

Pengamat politik Sumsel Bagindo Togar Butar Butar menyebutkan Pemilu 2024 dijamin berjalan netral hanya saja yang masih diragukan pihak penyelenggara.

“Masyarakat, TNI, Polri dan ASN saja dijamin mereka akan menjalankan Pemilu 2024 netral. Tetapi kalau untuk penyelenggara itu masih saya ragukan tidak netral,” kata dia.

Penyelenggara dimaksudkan Togar mereka adalah KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih bisa disusupi oleh politik praktis oleh oknum tertentu dan juga partai politik di belakangnya.

“Saya minta penyelenggara harus menjaga netralitas pelaksanaan Pemilu 2024, jangan terpancing dengan politik praktis apa lagi ditunggangi oleh oknum tertentu,” tegasnya.

Togar optimis semua ASN di Indonesia, TNI dan Polri akan berperilaku netral karena setiap kali Pemilu tidak ada terbukti mereka melakukan kecurangan tertentu dengan me-manfaat-kan

jabatan.

Indonesia hari ini jelas sudah terjadi pelanggaran etik dilakukan oleh Ketua MK. Alhasil, karena pelanggaran etik itu Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

“Jelas sekarang para pelanggaran ikut terlibat melakukan tindakan tidak netral di Pilpres 2024. Pencopotan ketua MK sudah menjadi bukti tersebut,” tuturnya.

Indikasi terbesar dalam pelanggaran keputusan MK akan terjadi dualisme keputusan dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Hal itu karena akan ada pelaporan atau gugatan baru terkait keputusan yang MK sebelumnya dinilai cacat hukum. Terbaru ada gugatan yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Brahma Aryana.

“Keputusan MK itu bersifat mutlak dan harus dijalankan dan dinilai sah. Walaupun keputusan itu menyebabkan Ketua MK dicopot karena pelanggaran etik. Kalau adanya gugatan baru itu diwujudkan atau terjadi ini yang akan menimbulkan dampak dualisme keputusan MK,” jelasnya.

Menurutnya keputusan MK sebelumnya soal batas umur sudah mutlak dan ditinjau ul-

ang lagi akan ada keputusan kedua. Apabila itu terjadi masyarakat Indonesia akan bingung karena ada dualisme keputusan MK di Pilpres.

“Bisa saja Prabowo melanjutkan menjadi Capres namun dia harus ganti cawapresnya Gibran. Karena tinjauan umur Gibran tidak akan lolos sebagai cawapres di Pilpres. Nah itu adalah solusi untuk konflik yang terjadi di MK soal Pilpres ini,” ungkapnya.

Togar khawatir apabila persoalan ini terus dibesar-besarkan akan berdampak kepada Pemilu. Tentunya masyarakat cenderung menarik semua pilihan atau bertindak anarkis memilih untuk serentak golput alis tidak mau memilih.

“Bisa saja akan muncul gerakan People Power dari masyarakat terhadap Pemilu 2024. Gerakan itu bisa masyarakat tidak mau menentukan pilihan di Pemilu.”

Kondisi ini dikhawatirkan bisa saja terjadi kalau penyelenggara Pemilu ikut terlibat dalam ketidak netralan Pemilu,” jelasnya.

Dia mengimbau agar masyarakat Indonesia tetap komitmen kepada netralisasi Pemilu 2024 dan tidak terpancing melakukan tindakan People Power tersebut.

“Jangan sampai itu terjadi walaupun perlu yurisprudensi baru untuk menjadi acuan dalam Pemilu lebih baik. Jangan sampai Pemilu 2024 ini tidak berjalan semestinya saja,” pungkasnya.

Terkait netralitas ini Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Agus Fatoni mengatakan, telah meminta kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumsel untuk menjaga netralitas di Pemilu 2024 nanti. Tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu mau pun ikut dalam politik praktis.

“Untuk Pemilu 2024, seluruh ASN di Sumsel wajib netral. ASN bertugas di birokrasi pemerintahan, tidak boleh ikut dalam politik praktis,” tegas Fatoni.

Menurutnya, netralitas ASN akan terus disosialisasikan kepada seluruh pegawai di Sumsel dan mereka diminta tidak berpihak kepada siapa pun.

Menurutnya, kondusifitas di Sumsel ketika pelaksanaan Pemilu akan terus dijaga. Untuk itu, ia meminta kepada seluruh stakeholder ikut berperan menciptakan kondisi damai Sumsel.

“Semua stakeholder memiliki peran dalam rangka menciptakan kondisi damai. Pemerintah, termasuk TNI/Polri akan menjalankan fungsinya untuk melaksanakan hal tersebut dan menjaga tetap kondusif,” bebernya.

Selain dari pemerintah, Fatoni juga berharap peran dari masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain-lainnya sangat diharapkan untuk menjaga Pemilu 2024 berlangsung damai.

“Dengan berlangsungnya Pemilu secara damai dan terjaganya kondusifitas, maka kenyamanan akan tercipta dan semuanya bisa menjalankan tugas dan aktivitas dengan baik,” bebernya.

Ia menambahkan, dengan kondusifnya situasi di Sumsel, maka akan banyak dampak positif yang akan diterima. Terlebih, nama baik Sumsel hingga saat ini masih terjaga dengan baik.

“Jika Pemilu berjalan damai, investor akan datang ke Sumsel,” tukasnya. ●RDR





AWASI NETRALITAS APARAT NEGARA

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk memberikan perhatian khusus kepada beberapa lembaga khusus berkenaan isu netralitas pemerintah, seperti BIN, TNI, Polri, kementerian, lembaga kepresidenan, dan pemerintah daerah.

Lembaga tersebut perlu mendapat perhatian khusus untuk memperoleh instruksi dari presiden agar tetap netral karena berpotensi untuk mengintervensi pemilu. Bahkan, Presiden Joko Widodo diminta untuk menerbitkan payung hukum yang akan menjadi pegangan dan pedoman bagi seluruh alat negara untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai tidak cukup atas pernyataan Presiden Jokowi yang mengimbau agar tidak ada pihak yang mengintervensi pemilu. Pernyataan tersebut dinilai sebatas imbauan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat.

“Permintaan presiden yang cenderung imbauan itu tentu tidak cukup. Namanya imbauan tentu tidak memiliki kekuatan mengikat untuk memaksa semua penyelenggara dan pihak-pihak terkait untuk tidak mengintervensi pemilu,” terang Jamiluddin di Jakarta, Kamis, 9 November 2023.

“Kalau semua lembaga tersebut mendapat instruksi dari presiden, setidaknya mereka akan berpikir panjang untuk mengintervensi pemilu. Apalagi kalau sanksinya diberikan secara tegas kepada mereka yang melakukan pelanggaran,” sambungnya.

KPU dan Bawaslu juga harus menjaga netralitas. Sebab, bukan rahasia lagi KPU dan

Bawaslu masih ada yang bermain mata dengan peserta pemilu. Karena itu, presiden harus memastikan KPU dan Bawaslu tetap taat asas melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan begitu, KPU dan Bawaslu di semua tingkatan tidak ada lagi yang tergoda dengan ajakan peserta pemilu untuk melakukan tindakan yang tidak netral.

“Jadi, presiden tidak cukup menghimbau kepada pihak-pihak terkait untuk tidak mengintervensi pemilu. Presiden harus mengeluarkan instruksi dengan sanksi tegas kepada semua lembaga terkait yang potensial mengintervensi pemilu. Hanya dengan begitu, intervensi terhadap pemilu dapat diminimalkan,” tegas Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati, mengatakan, Bawaslu semestinya bisa lebih aktif lagi mengawasi potensi penyalahgunaan alat-alat negara. Hal itu dilakukan sebab potensi pelanggaran bukan hanya di masa kampanye.

“Tapi juga sebelum masa kampanye seperti hari-hari ini (bisa terjadi penyalahgunaan alat-alat negara),” ujar Khairunnisa, Sabtu, 11 November 2023.

Khairunnisa menambahkan, meski masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023, namun potensi-potensi penyalahgunaan kewenangan bisa sudah terjadi sebelum masa kampanye resmi dimulai.

Dia mengkritik alasan Bawaslu yang kerap berdalih bahwa peserta pemilu

belum ditetapkan dan juga belum masuk masa kampanye, sehingga tidak bisa dilakukan penindakan.

“Padahal jelas tertulis dalam tugas dan wewenang Bawaslu, salah satunya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu sampai dengan memutuskan jika terjadi pelanggaran,” tegas Khairunnisa.

Khairunnisa meyakini, seharusnya dengan segala kewenangan saat ini, Bawaslu tidak sekadar menunggu saat masa kampanye. “Jadi sebelum masa kampanye harusnya sudah dilakukan juga untuk memastikan proses pemilu berjalan secara fair,” kata Khairunnisa.

Khairunnisa juga mendorong profesionalisme dan independensi Bawaslu. “Karena saat ini Bawaslu kita sudah bertransformasi menjadi lembaga yang memiliki kewenangan yang besar,” sambungnya.

Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, meminta agar Bawaslu merancang strategi khusus untuk menghadapi potensi kecurangan dan ketidaknetralan aparat sipil negara (ASN) di Pemilu 2024. Dia memandang gejala-gejala yang mengarah ke arah itu sudah mulai terlihat.

Usep mencontohkan penurunan baliho pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Bali beberapa waktu lalu. Ia menduga tindakan itu sengaja dilakukan penjabat Gubernur Bali Mahendra Jaya untuk memuluskan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke provinsi tersebut.

“Sulit untuk menyangkal bila Presiden bakal netral dalam pemilu 2024. Apalagi, sang anak (Gibran Rakabuming Raka) juga maju. Sulit

juga membantah bila aparat tidak digunakan untuk kepentingan politik,” kata Usep.

Menurut Usep, seluruh penjabat kepala daerah saat ini berada di bawah kendali presiden. Keberadaan para penjabat yang tak dipilih langsung oleh rakyat itu potensial dijadikan alat kemenangan pasangan calon tertentu. Selain itu, ia juga tak percaya Jokowi bakal benar-benar menghukum penjabat kepala daerah yang terindikasi memihak Prabowo-Gibran.

“Jokowi itu antara panggung belakang dengan panggung depan berbeda. Dia bilang pj kepala daerah harus netral. Padahal, tidak demikian,” ucap Usep.

Usep mengatakan Pemilu 2024 merupakan pertarungan integritas Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Sebelum melakukan pengawasan, dia juga meminta agar Bawaslu menjaga netralitas. Pasalnya, Usep melihat pengkondisian kemenangan Prabowo-Gibran sudah sangat terencana.

“Kalau berharap dengan masyarakat untuk berani melaporkan, menurut saya agak susah, karena ini hampir semuanya sudah termanajemen dengan baik untuk kepentingan tertentu. Selain itu, penyelenggara itu juga harus awas. KPU dan Bawaslu yang dituntut profesional. KPU itu kan punya kaki sebenarnya. Di kecamatan itu kan punya panita pengawas,” ucap Usep.

Tak hanya aparat penegak hukum dan ASN, isu ketidaknetralan lembaga negara dalam pemilu juga dialamatkan kepada KPU. Saat ini, KPU digugat Rp75 triliun karena meloloskan pendaftaran

Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Ketika Gibran didaftarkan, belum ada PKPU yang dibuat sebagai aturan turunan putusan MK.

Ketika itu, PKPU tidak bisa dibuat lantaran anggota DPR sedang masa reses. Sebagaimana amanat undang-undang, KPU harus berkonsultasi dengan Komisi II DPR dalam penyusunan PKPU. RDO





“Kita sudah menyusun roadmap dan sudah menyusun berbagai kerangka kerja. Kita bagi ke dalam tiga scope, yaitu sebelum pemilu, saat pemilu dan sesudah pemilu”

Ariandi Putra

INFO
KPU

9

Minggu II • November 2023

GUGUS TUGAS KEAMANAN SIBER PASTIKAN PEMILU BERJALAN AMAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan telah membentuk gugus tugas keamanan siber sejak awal tahapan pemilu, yakni pada 14 Juni 2022.

Anggota KPU, Idham Holik, menegaskan, pembentukan gugus tugas itu bertujuan untuk melindungi semua sistem informasi yang digunakan oleh KPU selama menghadapi tahun politik, sehingga integritas dan keamanan proses pemilu tetap terjaga.

“Gugus tugas keamanan siber ini untuk memonitoring, memitigasi, atau memproteksi semua sistem informasi yang digunakan oleh KPU,” ungkap Idham, Rabu, 8 November 2023.

Idham mengatakan, gugus tugas yang sudah dibentuk oleh KPU tersebut sudah bekerja sangat efektif dalam pengamanan seluruh sistem informasi yang dikelola oleh KPU.

Gugus Tugas Keamanan Siber KPU telah melibatkan seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan otoritas dalam mengelola aspek keamanan siber di Indonesia.

Melalui kolaborasi yang erat, gugus tugas tersebut berhasil mengintegrasikan berbagai pihak terkait, termasuk pihak kepolisian yang bertanggung jawab atas keamanan siber dalam negeri.

Anggota KPU, Betty Epsilon Idroos, menuturkan upaya penguatan keamanan siber dalam rangka menjamin integritas dan kepercayaan publik terkait hasil Pemilihan Presiden 2024.

“Pemanfaatan teknologi informasi pada tahapan Pemilu 2024 menjadi fokus utama KPU yang dilakukan melalui penguatan aspek keamanan, termasuk keamanan infrastruktur dan keamanan siber,” ujar Betty dalam rapat persiapan Gugus Tugas Keamanan Siber Pemilu 2024 di Kantor KPU, beberapa waktu lalu.

Betty menyampaikan langkah-langkah yang diambil yaitu bekerja sama dengan beberapa lembaga dan elemen terkait untuk memastikan penguatan dalam aspek infrastruktur dan keamanan siber sebagai tahapan Pemilu.

“KPU bekerja sama dengan Gugus Tugas yang terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), BRIN, Bareskrim Mabes Polri, dan Kementerian Kominfo,” kata Betty.

Anggota KPU, Mochammad Afifuddin, juga menyoroti isu hoaks yang berpotensi muncul dalam Pemilu 2024. Dia menegaskan perlunya antisipasi terhadap segala bentuk ujaran kebencian, hoaks, dan kampanye yang memanfaatkan isu SARA untuk menjaga integritas pemilu.

“KPU mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam menyebarkan informasi di media sosial, karena informasi yang belum terverifikasi dapat menimbulkan

kan persepsi yang salah di masyarakat,” ujar Afifuddin dalam Seminar Nasional Hasutan Kebencian Menjelang Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dengan adanya rapat Gugus Tugas Keamanan Siber Pemilu 2024, KPU berupaya keras untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara aman, transparan, dan bebas dari ancaman siber, serta upaya manipulasi informasi yang dapat mengganggu integritas demokrasi.

“Dengan berbagai langkah antisipatif ini, KPU berkomitmen untuk menjalankan Pemilu 2024 dengan aman, jujur, dan demokratis,” ujar Afifuddin.

Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, menyatakan telah menyiapkan tim yang berkoordinasi dengan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk menghadapi adanya potensi serangan siber selama masa pemilu 2024.

“Kita sudah menyusun roadmap dan sudah menyusun berbagai kerangka kerja. Kita bagi ke dalam tiga scope yaitu sebelum pemilu, saat pemilu dan sesudah pemilu. Saat pemilu ini artinya saat pemilihan,” kata Ariandi di Jakarta, Selasa, 7 November 2023.

Menanggapi upaya BSSN untuk memperkuat sistem komputer milik KPU, Ariandi menuturkan tim CSIRT dari BSSN berfungsi sebagai penghalau sekaligus pihak yang akan melakukan mitigasi atas adanya potensi serangan siber yang datang dari pihak luar.

Ketika ada sebuah pola trafik yang tidak biasa (traffic anomalies) yang terdeteksi oleh CSIRT di sistem komputer milik KPU, tim akan bergerak mengumpulkan bukti dan data terkait, kemudian disampaikan kepada KPU untuk segera mendapatkan tindak lanjut.

Temuan yang dilaporkan itu mencakup rekomendasi yang diberikan BSSN. Salah satu bentuk rekomendasi itu berupa Information Technology Security Assessment (ITSA) agar sistem elektronik KPU dapat tetap berjalan dengan baik.

“Kita juga kirimkan tim taktis untuk melakukan berbagai pemulihan saat insiden terjadi. Itu sudah

kita lakukan sebelum-sebelumnya, jadi bukan saat insiden ketika pemilu terjadi,” ujar dia.

Ariandi juga menjelaskan upaya lain yang dilakukan untuk melindungi sistem KPU dari kebocoran maupun manipulasi data, dijalankan dengan membuat skema dari tren ancaman siber untuk tahun 2023.

Skema yang dibuat mencakup serangan siber yang bersifat teknis, seperti web defacement, malware attack sampai dengan phishing. Kemudian ada pula serangan siber yang bersifat sosial, contohnya yakni hoaks, cuci otak dan indoktrinasi, termasuk AI sendiri.

“Kemungkinan-kemungkinan itu kita lihat sebagai sebuah mitigasi dini. Dalam hal tersebut, kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam rangka meminimalisir kemungkinan kebocoran data dan juga dalam rangka menguatkan sistem elektronik yang dimiliki KPU,” ujarnya.

Meski CSIRT ikut berperan menjaga sistem keamanan pemilu secara siber, tetapi kendali utama sebagai pemilik sistem elektronik tetap menjadi milik KPU sebagaimana yang tertuang dalam PP 71/2019.

Dia menjelaskan tugas dan fungsi BSSN selama pemilu hanya untuk m e m -

perkuat sistem keamanan, memberikan as-esmen, memberikan pembinaan dan pelatihan kepada kementerian/lembaga terkait.

Sementara untuk pencegahan, paman-tauan pemilu dari sebelum sampai selesai, BSSN telah membentuk Satgas Pemilu yang sudah mulai bekerja sejak awal tahun hingga selesainya pelantikan presiden dan wakil presiden pada Oktober 2024.

“Setelah itu, jika terjadi insiden siber dan lain-lain, kita sudah menyusun semua roadmap-nya, termasuk kerja sama dengan berbagai stakeholder seperti TNI/Polri, Bawaslu, KPU termasuk Kominfo,” ucapnya.

Pakar Teknologi dan Informasi (TI) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Supangat, menyebut data pemilu rawan menjadi target dari ancaman serangan siber.

“Salah satu ancaman utama adalah pencurian identitas pemilih, terutama Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berisi data sensitif, seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor identifikasi,” kata Supangat.

Supangat mengatakan tantangan keamanan elektronik dalam pemilu, yakni meningkatkan perlindungan data pemilih dalam beberapa dekade terakhir. Sebab, perkembangan teknologi telah mengubah lanskap pemilu secara signifikan.

Menurut dia, pemilu memegang peranan penting dalam menjaga sistem demokrasi dan memberikan kesempatan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sehingga, untuk menjaga demokrasi yang kuat, hal itu penting untuk memastikan pemilu yang aman dan perlindungan data pemilih yang kuat.

“Penggunaan teknologi digital telah diterapkan oleh penyelenggara pemilu di berbagai tingkat untuk menjaga transparansi dan kelancaran proses pemilu. Namun, perlu diingat bahwa keberadaan teknologi juga membawa ancaman baru, terutama dalam bentuk serangan siber,” ujar Supangat. •RDO





MODAL BESAR PKB MENANGKAN PILKADA KALTIM

Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur (Kaltim), Syafruddin, telah mengumumkan bahwa partainya berencana untuk mengusung calon gubernur (Cagub) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

“Ada tiga nama yang akan kami dukung untuk posisi Cagub, sebagaimana disepakati dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskewil) beberapa waktu lalu, sesuai arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB,” katanya.

Ia kemudian mengungkapkan tiga calon yang telah dipersiapkan untuk berkompetisi dalam Pilkada mendatang, yaitu Wali Kota Bontang, Basri Rase, Bupati Paser, Fahmi Fadli, dan legislator Kaltim, Sutomo Jabir.

“Kami berkomitmen untuk mengusung kader internal partai kami dalam Pilkada Kaltim 2024,” jelasnya.

Dia juga menambahkan bahwa PKB Kaltim telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam Pilkada Kaltim 2024 tanpa mengikatkan diri pada target tertentu, baik sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur.

Keputusan akhir akan dipengaruhi oleh perkembangan politik di daerah tersebut.

Syafruddin mengakui bahwa ada dua kepala daerah kader PKB, yaitu Wali Kota Bontang dan Bupati Paser, yang dinilai memiliki kapabilitas yang cukup untuk menjadikan PKB optimis dalam memenangkan pertarungan Pilkada Kaltim 2024.

“Salah satu dari dua kepala daerah ini (Bontang dan Paser) mungkin akan kita dukung, dan keduanya telah terbukti mampu mengelola wilayahnya masing-masing,” tambahnya.

Walikota Bontang Basri Rase telah memberikan isyarat bahwa dia berencana untuk maju kembali dalam Pilkada 2024. Dirinya telah memimpin Bontang selama lebih dari dua tahun bersama dengan wakilnya, Najirah.

Dalam proses kepemimpinannya, Basri Rase mengklaim memiliki modal besar untuk kem-

bali maju, seiring dengan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin kuat sejalan dengan pencapaian visi dan misinya yang telah mencapai 50 persen.

Basri Rase menyatakan bahwa salah satu tolak ukur pencapaiannya dapat dilihat dari janji penanganan banjir, yang menurutnya berjalan sesuai rencana.

Upaya ini termasuk rehabilitasi drainase sepanjang Jalan S Suprpto dan di sisi kanan Jalan Jenderal Achmad Yani di Bontang Utara. Selain itu, pembangunan turap juga telah dilakukan di beberapa titik, seperti di Kelurahan Api-Api dan Kelurahan Guntung, yang merupakan daerah rawan banjir.

Selain prestasi tersebut, Basri Rase juga mengklaim berhasil meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program seperti “rantang kasih” dan penyediaan wifi gratis. Hal ini membuatnya yakin bahwa realisasi visi dan misinya pada tahun ini dapat mencapai 70 persen.

“Ini membuat saya optimis untuk maju kembali,” ungkap Basri.

Namun, Walikota Basri Rase juga mengakui bahwa program “motor RT,” yang juga merupakan bagian dari visi dan misinya, hing-

ga saat ini belum terlaksana sepenuhnya.

“Yang belum terwujud hanya realisasi motor RT, jika program tersebut selesai dalam perubahan ke depan, maka itu akan menjadi salah satu pencapaian yang dapat dihitung,” tambahnya.

Selain itu, Basri Rase juga menekankan bahwa selama kepemimpinannya, ia telah berhasil memudahkan masuknya investasi ke Kota Bontang, sesuai dengan salah satu visinya yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah investasi di wilayah tersebut.

“Saya tidak merasa terbebani dalam memimpin Bontang, semuanya berjalan dengan lancar. Biarkan masyarakat yang menilai,” pungkasnya.

Basri Rase adalah sosok yang sangat terkenal di Kota Bontang saat ini, terutama karena dia menjabat sebagai Wali Kota Bontang untuk periode 2020–2024.

Keberhasilannya dalam Pilkada 2020 lalu, di mana Partai PKB mendukungnya sebagai salah satu calon Wali Kota, telah menjadikan namanya begitu populer di kancah politik lokal. Ketenarannya di dunia politik tidak

datang dengan cepat. Awal karir politiknya dimulai ketika dia terpilih sebagai anggota DPRD pada pemilihan anggota legislatif tahun 2009. Dia kemudian terpilih kembali untuk periode kedua pada pemilihan anggota legislatif tahun 2014.

Namun, dalam waktu singkat setelah menjabat sebagai anggota legislatif periode kedua, Basri Rase memutuskan untuk mengundurkan diri dan mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Bontang melalui jalur independen pada pemilihan wali kota Bontang tahun 2015.

Hasilnya, dia berhasil memenangkan kursi Wakil Wali Kota berpasangan dengan calon Wali Kota saat itu, Bunda Neni.

Setelah lima tahun menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bontang dalam pemilihan sebelumnya, bersama pasangannya. Kembali, dia meraih keberuntungan dan terpilih sebagai Wali Kota Bontang untuk periode 2020–2024.

Namanya bahkan disebut sebagai salah satu calon potensial dalam Pilgub Kalimantan Timur mendatang di dalam partainya sendiri, karena selain popularitasnya di kalangan anggota partai dan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya di Kota Bontang.

Kontribusinya terhadap DPC PKB Kota Bontang sangat besar. Saat dia memimpin, PKB sama sekali tidak memiliki kursi di parlemen.

Namun, di bawah kepemimpinannya, PKB berhasil meraih 3 kursi di parlemen pada pemilu legislatif 2019. Hasil ini menjadi landasan kesuksesannya dalam mencapai jabatan Wali Kota Bontang.

Dia menjadi perhatian dalam acara Muspimwil PKB Kaltim, yang juga merupakan persiapan menjelang Pemilu serentak 2024. Agenda utamanya adalah memeriksa persiapan kader dan memastikan partainya siap menghadapi Pemilu serentak dan kontestasi Pemilihan Gubernur Kaltim pada 2024 mendatang. ● IRY





“Sahroni yang kita masukan tentunya, apalagi beliau sebagai Bendum sebuah kebanggaan bagi kami, beliau dari Jakarta, punya banyak massa.

Nurcahyo

INFO PILKADA

Minggu II • November 2023

11

JANJI AHMAD SAHRONI UNTUK DKI JAKARTA

Partai NasDem akan mencalonkan salah satu kadernya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Bendahara Umum NasDem, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, akan diusung sebagai Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta.

Beberapa waktu lalu, Wakil Sekretaris Jenderal NasDem, Hermawi Taslim membenarkan kabar bahwa NasDem sedang menyiapkan Ahmad Sahroni untuk maju di Pilgub DKI Jakarta 2024.

“Ya, NasDem menyiapkan Sahroni,” jelasnya.

Meskipun rencana pencalonan Sahroni sudah diputuskan, Partai NasDem belum menentukan siapa yang akan menjadi calon wakil gubernur DKI. Partai tersebut masih tengah melakukan pemetaan untuk mencari calon wakil gubernur yang memiliki potensi dan kualifikasi yang sesuai.

“Lagi kita peta-petakan,” katanya.

Sebelumnya, pada tahun 2022, Ahmad Sahroni pernah dijodohkan dengan politikus dari Partai Golkar, Airin Rachmi Diany.

Namun, Hermawi menjelaskan bahwa belum ada kepastian apakah Sahroni akan dipasangkan dengan Airin sebagai calon wakil gubernur.

“Belum pasti,” Sambungnya.

Sebelumnya, Ketua DPW NasDem DKI Jakarta, Nurcahyo, mengungkapkan beberapa nama yang sedang dipertimbangkan dalam konteks politik DKI Jakarta. Salah satu nama yang disebutkan adalah Ahmad Sahroni dan Wibi Andrino yang menjabat sebagai Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta.

“Sahroni yang kita masukan tentunya, apalagi beliau sebagai Bendum sebuah kebanggaan bagi kami, beliau dari Jakarta, punya banyak massa,” ulasnya.

Dia juga menambahkan Wibi Andrino mungkin juga akan dimajukan atau dicalonkan.

“Tapi ada juga Wibi Andrino Ketua Fraksi NasDem kita mungkin akan juga kita majukan atau calon,” tegasnya.

Selain dari kalangan tokoh internal partai, Nurcahyo juga menyebut adanya pertimbangan terhadap tokoh eksternal. Namun, dia belum merinci sosok-sosok yang dimaksud.

“Dari pemantauan kami ada pihak eksternal internal yang mungkin akan kami majukan tergantung persentase yang tadi saya bilang dan tergantung dinamika di Jakarta setelah pileg,” jelasnya.

Nurcahyo menegaskan bahwa NasDem tidak ingin terburu-buru menetapkan calon kepala pemerintahan DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan koalisi partai untuk Pemilu 2024 masih bergerak dinamis.

“Tapi ada tim kecil yang berupaya men-

jaring yang akan kami majukan dalam Pilkada. Tapi mungkin itu lebih jelasnya kita bicarakan pasca-Pemilu Legislatif karena kan terkait koalisi, suara NasDem di 2024,” tutupnya.

Sementara, Legislator Dapil DKI Jakarta, Ahmad Sahroni mendapat dorongan dari warga untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Hal itu terungkap saat Ahmad Sahroni melakukan kunjungan reses di Kecamatan Koja dan Kelurahan Sunter Agung.

Awalnya, Sahroni menekankan pentingnya penggunaan hak partisipasi dalam pemilu, sambil meminta agar angka golput, khususnya di wilayah Jakarta Utara, dapat diminimalkan.

“Saudara-saudara, sebentar lagi pemilu akan datang, saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk menggunakan hak suara dengan sebaik-baiknya. Mari kita hindari golput, terutama di Jakarta Utara,” kata Sahroni.

K e -

tika Sahroni hampir menutup pidatonya, seorang ibu dari kerumunan tiba-tiba bertanya tentang rencana Sahroni dalam Pilgub 2024. Ibu tersebut mendorongnya untuk maju sebagai calon gubernur dengan harapan agar ada wakil dari Tanjung Priok yang menjadi gubernur.

Sahroni menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa meskipun ia memimpin menjadi presiden, ia akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta jika mendapatkan restu dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

“Kalau bicara tentang keinginan, saya bermimpi menjadi presiden.

iden. Sebagai Gubernur DKI, kita lihat saja nanti,” lanjut Sahroni.

Namun, mengenai pencalonannya dalam Pilkada DKI 2024 yang akan datang, Sahroni sebagai seorang kader menunggu perintah dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Meski begitu, Politikus NasDem ini juga menyinggung sejumlah masalah yang terjadi di Jakarta. Menurut Sahroni, ini karena masih banyak warga yang mengadu kepada dirinya.

“Masalah di Jakarta ini engga jauh-jauh dari tiga isu utama. Macet, banjir, dan sampah,” tegasnya.

Masalah tersebut, sambung Ahmad Sahroni bisa diatasi secara perlahan. Salah satunya dengan mengajukan saran serta solusi ke Pemprov DKI Jakarta.

“Nah Inshaallah masalah itu pelan-pelan kita tuntaskan. Saya beberapa kali sudah mengajukan saran serta solusi ke Pemprov. Saya akan kawal terus Jakarta agar bisa lebih baik lagi dari segala aspek,” kata dia.

Ahmad Sahroni lahir pada 8 Agustus 1977 dan merupakan seorang anggota DPR RI dua periode sejak tahun 2014 dari Dapil atau Daerah Pemilihan DKI Jakarta III.

Ahmad Sahroni saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI periode 2019 hingga 2024. Ahmad Sahroni juga ditunjuk oleh Gubernur DKI Jakarta 2021 yakni Anies Baswedan sebagai Ketua Pelaksana Formula E 2022.

Ahmad Sahroni juga menjabat sebagai Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sejak 2019 hingga saat ini.

Ahmad Sahroni sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta sebagai Bendahara DPW pada tahun 2013 hingga 2014 dan Ketua DPW pada 2014 hingga 2015.

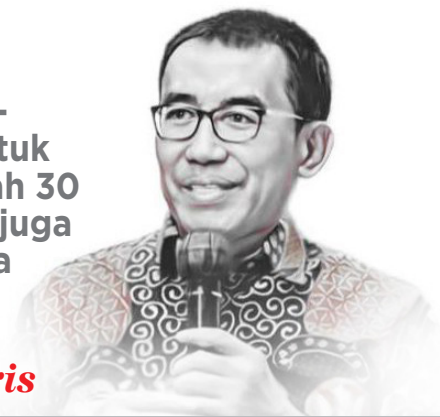
Berkaitan dengan karir politiknya, Ahmad Sahroni pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Koperasi dan Wiraswasta DPP Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS).

Tahun 2013, Bendahara Umum DPW DKI Jakarta Partai Nasdem, sebagai Bendum. Tahun 2013, Bendahara Fraksi Partai Nasdem DPR RI, sebagai Bendum. Tahun 2014, Plt. Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, sebagai ketua. Tahun 2014 hingga 2015, dan lain sebagainya. ●IRY



“PKS mewajibkan semua kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk memiliki caleg berusia di bawah 30 tahun. Setiap kabupaten/kota juga diwajibkan memiliki setidaknya satu wakil dari Gen Z”

Muhammad Haris



AMBISI CALEG MUDA RAUP SUARA GEN Z

Dalam pemilihan umum (pemilu) tahun 2024, perhatian juga diberikan kepada generasi muda sebagai wakil rakyat atau calon anggota legislatif (caleg).

Banyak partai politik (parpol) yang mulai melibatkan anak muda sebagai kader mereka. Bahkan, beberapa dari mereka turut serta dalam pertarungan pemilihan anggota legislatif (Pileg), meskipun pengalaman mereka dalam politik masih terbatas.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota besar seperti Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah.

Salah satunya adalah di Kota Magelang, di mana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berperan aktif dalam hal ini. Ketika pendaftaran bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu, DPD PKS Kota Magelang mendaftarkan kader termudanya, yakni Wildan Anwar Hakim (23 tahun).

Wildan, yang lahir pada 4 September 2000 di Magelang, mendaftarkan diri sebagai Bacaleg di daerah pemilihan (dapil) 2 Magelang Tengah.

Meskipun ia terdaftar pada nomor urut 10, yang artinya ia berada di posisi paling bawah dalam daftar caleg dari partainya, hal tersebut tidak membuatnya patah semangat.

Wildan saat ini merupakan mahasiswa semester 8 jurusan hukum di Universitas Diponegoro (Undip), yakin bahwa nomor urut bukanlah penghalang dalam perjuangannya dalam Pileg. Motivasinya untuk melayani masyarakat, khususnya anak muda, sangat kuat.

“Anak muda seharusnya dipertimbangkan sebagai calon legislatif karena mereka dapat mewakili perspektif dan aspirasi generasi muda yang seringkali berbeda dari generasi sebelumnya,”ujarnya.

Ia meyakini bahwa anak muda cenderung lebih inovatif dan memiliki kemampuan berpikir kritis, yang merupakan kualitas penting dalam pembuatan kebijakan.

“Selain itu, melibatkan partisipasi politik anak muda akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab generasi muda terhadap proses politik dan pembangunan negara,”jelasnya.

Wildan berpendapat bahwa sektor pemuda harus terus didorong agar memiliki kesempatan dan peran yang lebih besar dalam pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.

Wildan juga memiliki target ambisius dalam pemilihan nanti, yakni meraih sekitar 3.000 suara dari total sekitar 36.000 suara di Dapil 2.

Bagiannya, minimal harus meraih 1.700 suara untuk bisa mendapatkan kursi seba-

gai wakil rakyat.

Jika terpilih, Wildan berharap dapat bergabung dalam Komisi C yang salah satunya bertanggung jawab dalam hal pendidikan. Ia ingin berperan dalam mendorong perkembangan pendidikan nonformal di Magelang agar semakin maju dan diakui oleh orang tua.

“Saya merasa prihatin melihat banyak anak muda saat ini yang kurang memiliki kegiatan yang terarah setelah sekolah. Banyak dari mereka hanya menghabiskan waktu dengan bersantai, nongkrong, atau bahkan terlibat dalam konflik remaja,”sambungannya.

Menurut Wildan, sebaiknya setelah sekolah, mereka harus terlibat dalam kegiatan positif atau melanjutkan pembelajaran, baik di rumah, dalam lingkungan mereka, atau melalui lembaga pendidikan nonformal seperti pelatihan bahasa Inggris yang berkualitas.

Selain itu, Wildan juga berkomitmen untuk mendukung dan mengoptimalkan sembilan program unggulan yang telah diusung oleh Wali Kota Magelang, salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat Maju, Sehat, Bahagia (Rodanya Mas Bagia).

Jika terpilih, ia bersama PKS berencana untuk meningkatkan nilai program tersebut dari Rp 30 juta per RT per tahun menjadi Rp 50 juta per RT per tahun.

Dengan semangatnya yang tinggi, Wildan Anwar Hakim berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Magelang dan melayani masyarakat, terutama generasi muda, melalui perannya sebagai calon anggota legislatif.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jateng, Dr. H. Muhammad Haris, memiliki target ambisius dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Ia berharap PKS bisa memenangkan 18 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah. Pada Pemilu 2019, PKS berhasil meraih 10 kursi di DPRD Jawa Tengah.

Dengan tekad, usaha, dan doa, Haris yakin bahwa mereka dapat mencapai target peningkatan suara sebesar 15 persen pada Pemilu 2024.

“Selain itu, PKS juga memiliki harapan untuk meningkatkan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 7 kursi menjadi 12 kursi,”ungkapnya.

Haris, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Salatiga, menyatakan bahwa PKS terus berkembang secara bertahap. Ia optimistis dengan perkembangan partainya.

Dalam upaya meraih suara yang lebih besar pada pemilu mendatang, DPW PKS Jateng memahami pentingnya mendekati pemilih dari kalangan milenial atau Gen Z. Pada pemilu 2024, suara dari Gen Z di Jawa Tengah diperkirakan mencapai lebih dari 50 persen.

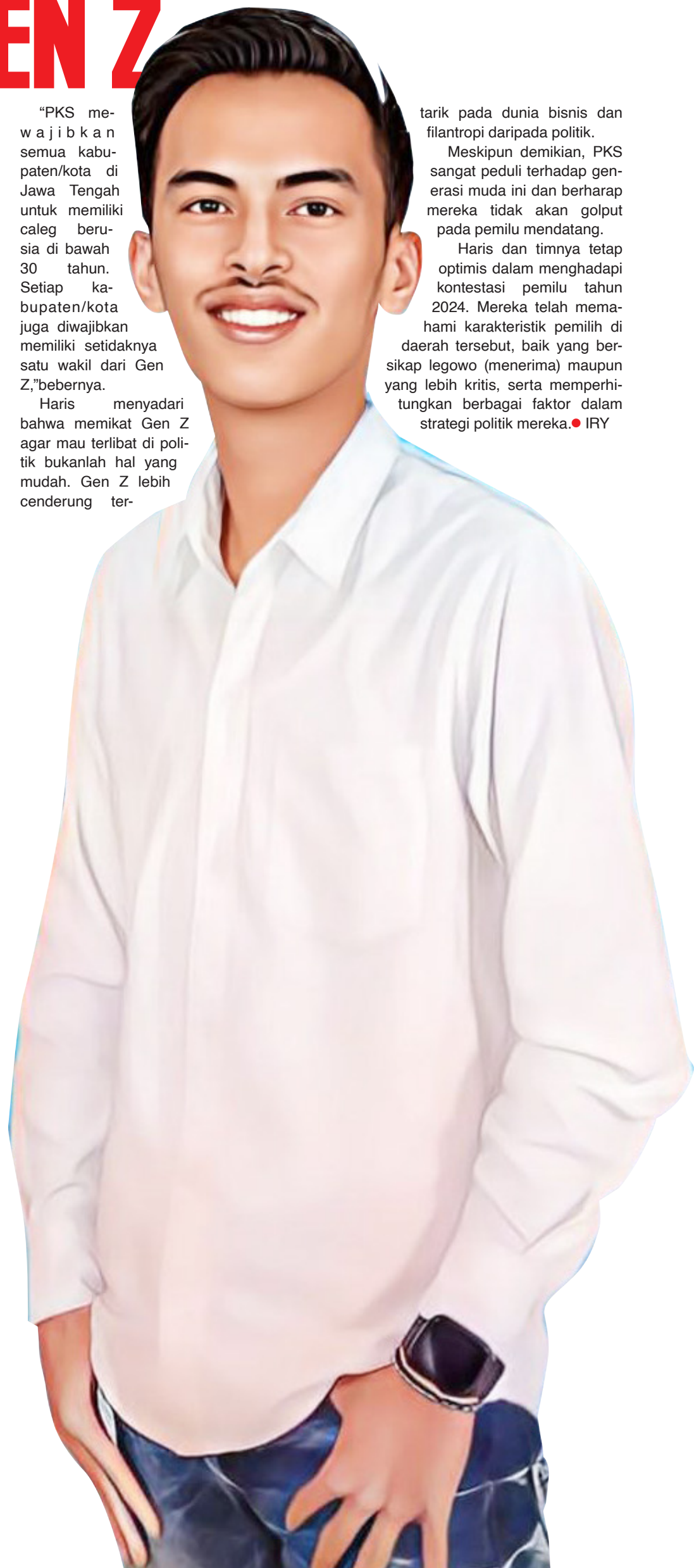
“PKS mewajibkan semua kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk memiliki caleg berusia di bawah 30 tahun. Setiap kabupaten/kota juga diwajibkan memiliki setidaknya satu wakil dari Gen Z,”bebernya.

Haris menyadari bahwa memikat Gen Z agar mau terlibat di politik bukanlah hal yang mudah. Gen Z lebih cenderung ter-

tarik pada dunia bisnis dan filantropi daripada politik.

Meskipun demikian, PKS sangat peduli terhadap generasi muda ini dan berharap mereka tidak akan golput pada pemilu mendatang.

Haris dan timnya tetap optimis dalam menghadapi kontestasi pemilu tahun 2024. Mereka telah memahami karakteristik pemilih di daerah tersebut, baik yang bersikap legowo (menerima) maupun yang lebih kritis, serta memperhitungkan berbagai faktor dalam strategi politik mereka. ● IRY





“Kita sangat bangga atas keputusan Ridho Rahmadi maju di Dapil Sumbar 1 demi kemenangan bersama dan menjaga harga diri seluruh kader dan simpatisan Partai Ummat”

Taslim

INFO
CALEG

Minggu II • November 2023

13

ATUR STRATEGI, RIDHO RAHMADI TURUN GUNUNG

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, telah mengumumkan kesiapannya untuk bertarung dalam Pemilu 2024 di daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat (Sumbar) 1.

Ridho Rahmadi menjadi satu-satunya Ketua Umum partai yang akan bersaing di Sumbar, Ridho mengungkapkan harapannya untuk meraih satu kursi di Dapil Sumbar 1.

“Di Sumbar 1 ini, kita berharap dapat satu kursi. Insyaallah kita yakin,”katanya.

Untuk meraih kemenangan Partai Ummat di Sumbar, Ridho Rahmadi telah merencanakan berbagai strategi yang meliputi sosialisasi kepada masyarakat dan penggaetan generasi muda untuk mendukung Partai Ummat.

“Salah satunya dengan mendekati anak-anak muda. Itu termasuk perjalanan kita ke kampus-kampus dan sosialisasi langsung ke masyarakat,” jelasnya.

Mengenai alasan pemilihannya maju di Dapil Sumbar 1, Ridho Rahmadi menjelaskan bahwa Sumbar memiliki nilai historis dan merupakan tempat di mana Partai Ummat telah berjuang secara ideologis.

“Saya pilih Sumbar, karena dari analisis dan faktanya Sumbar itu merupakan Serambi Madinahnya Partai Ummat,”sambungnya.

Selain alasan ini, Ridho Rahmadi juga merujuk pada sejarah kemenangan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, dalam Pilpres 2004 di Sumbar.

“Ditambah data historis, pak Amien Rais menang di tiga wilayah, salah satunya di Sumatera Barat,” tambahnya.

Ridho Rahmadi menegaskan bahwa dalam Pemilu 2024, seluruh mesin kader Partai Ummat akan siap bergerak dan bersosialisasi langsung dengan masyarakat.

Meskipun dia tidak mendiskusikan pencalonan dan Pileg secara rinci, dia menekankan bahwa tujuan utama berdirinya Partai Ummat adalah untuk mendorong kebaikan (bil-ma'rūfi) dan melarang kemungkaran (anil-munkar).

Ketua DPW Partai Ummat, Taslim, menyatakan kebanggaannya atas keputusan Ridho Rahmadi untuk maju di Dapil Sumbar dan menekankan bahwa langkah ini diambil demi kemenangan bersama dan menjaga harga diri seluruh kader dan simpatisan Partai Ummat.

“Kita sangat bangga atas keputusan Ridho Rahmadi maju di Dapil Sumbar 1 demi kemenangan bersama dan menjaga harga diri seluruh kader dan simpatisan Partai Ummat,”ungkapnya.

Keterlibatan Partai Ummat dalam Pemilu 2024 tidak bisa dilepaskan dari peran penting yang dimainkan oleh Amien Rais dan ketua partai tersebut, Ridho Rahmadi. Dalam berbagai sumber, informasi mengenai latar belakang Ridho Rahmadi menyatakan bahwa ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 13 April 1985.

Ia adalah menantu dari Amien Rais dan telah ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Ummat, sedangkan Amien Rais sendiri menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro. Selain berperan sebagai seorang politikus, Ridho juga merupakan seorang akademisi.

Ridho Rahmadi adalah suami dari Tasniem Fauzia Rais, putri keempat dari Amien Rais. Ia merupakan seorang ahli teknologi yang meraih gelar PhD-nya dari Radboud University, Belanda.

Selain itu, Ridho Rahmadi juga memperoleh dua gelar master dalam bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence) dari Czech Technical University di Praha, Republik Ceko, dan Johannes Kepler University di Austria.

Setelah menyelesaikan studinya di Belanda, Ridho pernah menjadi peneliti tamu di Carnegie Mellon University, Amerika Serikat. Ia juga aktif mengajar di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, sebelum bergabung dengan Partai Ummat.

Mantan Wakil Ketua Partai Ummat, Agung Mozin, telah mengungkapkan bahwa penunjukan Ridho Rahmadi sebagai ahli teknologi informasi adalah keputusan yang sangat tepat yang diambil oleh Majelis Syuro.

“Hal ini dikarenakan dalam dunia politik saat ini, keahlian dalam teknologi sangat dibutuhkan agar sebuah partai dapat bersaing dengan partai lainnya,”katanya.

Agung juga berharap bahwa usia yang masih muda dan termasuk dalam generasi milenial dapat membantu Partai Ummat mendapatkan dukungan dari kaum muda.

Agung menekankan bahwa dalam politik, integritas dan kapabilitas bukanlah satu-satunya faktor penting. Loyalitas terhadap partai juga merupakan hal yang sangat penting. Ia percaya bahwa semua kriteria tersebut sudah ada pada Ridho Rahmadi, menantu Amien Rais.

Partai Ummat secara resmi didirikan oleh Amien Rais di Yogyakarta pada tanggal 29 April 2021.

Dengan usianya yang baru

menapai 38 tahun, Ridho menjadi salah satu Ketua Umum Partai Politik termuda yang akan bersaing di Pemilu 2024.

Di bawah kepemimpinan Ridho, Partai Ummat berhasil lolos sebagai peserta Pemilu 2024, yang merupakan partisipasi perdana partai tersebut dalam pemilihan umum.

Menurut informasi yang dilansir Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan bahwa Partai Ummat berhasil memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024. Setelah lolos, Ketua Majelis Partai Ummat, Amien Rais, mendorong Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk tidak menunda Pemilu 2024.

Keberhasilan Partai Ummat dalam memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024 tidak lepas dari bimbingan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang menginstruksikan KPU untuk melakukan verifikasi faktual perbaikan di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, menetapkan nomor urut 24 untuk Partai Ummat dalam Pemilu 2024.

Sebelumnya, Partai Ummat mengajukan gugatan terhadap KPU karena awalnya dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) dalam kepengurusan di wilayah NTT dan Sulawesi Utara.

Setelah mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu antara Partai Ummat dan KPU, partai ini diberi kesempatan untuk mengikuti verifikasi faktual kembali.●IRY



“Saya tentu memahami pikiran kalangan milenial yang lahir di era 80-an dan 90-an, progress perkembangan teknologinya seperti apa dan bagaimana”



Mayasari Dwi Septiana

BERANI MELAWAN ARUS DEMI GENDER EQUALITY LEBIH BAIK

Mayasari Dwi Septiana memutuskan masuk dunia politik dengan menjadi kader Partai Nasdem. Kini, Maya-- sapaan akrabnya, mencalonkan diri menjadi anggota legislatif (Caleg) DPR RI Dapil 2 Sumsel. Ia memilih berhenti dari profesi yang diidamkan banyak orang, sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di salah satu kementerian dan pegawai anak perusahaan sebuah BUMN.

Sosok Mayasari Dwi Septiana mungkin menjadi salah satu contoh politisi anak muda yang diinginkan masyarakat. Bukan hanya muda tapi juga berpendidikan tinggi, cerdas serta memiliki visi dan misi yang jelas tentang politik dan sikap.

Cara bicaranya yang spontan, lugas, cepat menjadi ciri khas anak muda yang membawa semangat perubahan lebih baik lagi. Bukan itu saja, dia juga berani melawan arus demi sebuah sikap yang diinginkannya.

Tidak semua orang berani mengambil sebuah tindakan dan resiko yang besar dengan melepas status pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil (ASN) di sebuah kementerian terbaik di Indonesia. Namun Mayasari berani mengambil tindakan itu karena baginya sebuah kenyamanan dalam berkarya lebih berharga daripada bekerja namun tidak sesuai dengan keinginan.

Kehadirannya di dunia perpolitikan sebagai upaya meningkatkan kesetaraan gender kaum wanita. Dimana saat ini tingkat keterwakilan wanita masih belum optimal dalam dunia politik. Kehadirannya juga membuat dunia politik lebih berwarna,

selain karena wanita dan pendatang baru, dirinya merupakan perwakilan dari kalangan milenial.

“Secara umum, saya akui kaum wanita punya privilege dalam semua aspek kehidupan. Keterlibatan wanita untuk gender equality seharusnya ada dalam semua aspek, baik itu isu politik, ekonomi dan lainnya,” ujar Maya.

Selain itu, dirinya juga merupakan anak seorang petinggi partai sehingga memiliki privilege lebih.

Dirinya menilai, privilege yang dimiliki bisa dikonotasikan positif dan negatif. Jika hak istimewa yang dimiliki dimanfaatkan untuk mengevaluasi diri dan kemampuan, maka bisa menjadi hal positif. Namun, jika privilege yang dimiliki disalah gunakan dan didapat secara terkonsep, makna konotasinya akan menjadi negatif.

Meski memiliki privilege, dirinya tak ingin memakainya dalam kontestasi politik dalam Pileg 2024 nanti. Ia sudah menawarkan sebuah ide dan gagasan untuk bisa menjadi wakil rakyat di DPR RI. Beberapa hal akan ia tawarkan kepada konstituennya dalam pencalonannya.

“Pertama, saya masih muda dan baru, tentunya belum memiliki dosa politik. Kemudian saya orang lokal Sumsel yang pernah tinggal di luar kota, akademik saya mencakupi, pemikiran cukup kritis dan saya punya value hidup,” beber Caleg DPR RI nomor 7 dari Partai Nasdem ini.

Pilih Keluar dari PNS

Bisa dikatakan, Maya memiliki riwayat pengalaman yang cukup baik. Dirinya

pernah bekerja di salah satu kementerian terbaik sebagai seorang PNS. Namun, profesi yang dilakoni tak sesuai dengan keinginannya. Dirinya pun memilih keluar dari status yang diidamkan banyak orang.

“Padahal secara tempat, saya bekerja di direktorat dan kementerian terbaik di Indonesia. Memang ketika awal diterima PNS, saya mencoba terlebih dahulu dan sudah berpikir tidak akan bertahan lama. Saya orangnya thinker, pemikir dan saya melihat masa depannya saya tidak disitu,” ungkapnya.

Sehingga, ketika memutuskan berhenti, Maya mendapat teguran dari orang tua dan orang di sekitarnya. Namun, karena merasa tidak akan bisa maksimal dan bermanfaat bagi orang banyak, sehingga memilih terjun ke dunia politik.

“Secara value, saya adalah orang yang suka membantu orang. Saya giver orangnya, sementara menjadi PNS monoton, tidak bisa mengakomodir keinginan rakyat. Meski politik kata orang-orang menyeramkan, tapi saya berharap bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang,” bebernya.

Maya mengakui, meski belum banyak dikenal masyarakat di Dapil 2 Sumsel, dirinya tetap berusaha turun ke lapangan dan banyak bertemu konstituen dalam beberapa waktu terakhir. Baliho juga menjadi salah satu upaya masif yang dilakukannya.

“Saya berusaha memaksimalkan waktu yang singkat ini agar dikenal luas masyarakat. Dari sembilan kabupaten dan dua kota di Dapil Sumsel II, saya akan fokus di tiga daerah, yakni Muara Enim, PALI dan Prabumulih. Saya tidak akan mungkin bisa masuk ke semua daerah,

setidaknya saya dikenal oleh 10 persen masyarakat saja sudah Alhamdulillah,” bebernya.

Jika terpilih, dirinya berharap bisa duduk di komisi yang membidangi infrastruktur atau ekonomi. Namun, keputusan itu ia kembalikan ke partai karena penempatan yang diberikan akan menyesuaikan dengan kapasitas dan pribadi seseorang.

Ia menilai, permasalahan yang ada di Dapilnya secara umum sama dengan daerah lain. Dirinya yang pernah tinggal di luar Pulau Sumatera merasa

permasalahan keadilan kurang dirasakan hampir di semua wilayah.

“Masih banyak hal yang belum sesuai dengan sila kelima Pancasila. Baik dalam hal pendidikan, kesehatan, berbagai kesempatan, permasalahan hukum dan lain-lain. Contoh nyata adalah masalah pendidikan di kota dan pelosok, kualitas pendidikan sangat jauh berbeda,” ungkapnya.

Menurutnya, kalangan milenial saat ini akan menentukan masa depan bangsa dimana bonus demografi pada 2045 mendatang akan diisi oleh anak-anak pada era saat ini. Berbagai kebijakan yang dibuat, dipastikan menjadi hal yang penting bagi mereka.

“Saya tentu memahami pikiran kalangan milenial yang lahir di era 80-an dan 90-an, progress perkembangan teknologinya seperti apa dan bagaimana. Sehingga, kalangan ini yang jumlahnya mencapai 50-an persen, saya sangat paham apa yang mereka pikirkan secara umum untuk generasi berikutnya,” jelasnya.

Dirinya juga berpandangan, jika Indonesia akan kian berkembang pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, negara-negara di kawasan Asia akan menjadi center of the world dan menjadi hegemoni. Sementara negara-negara Barat disebutkan tidak akan sebaik Asia.

“Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar, ditambah bonus demografi 2045 mendatang, akan menjadi market besar dunia. Indonesia akan menjadi negara besar dunia, apalagi jika didukung good government akan lebih meroket,” ungkap Maya.

Politik Bukan Soal Hitam Putih

Meski masih muda, Maya punya sikap politik yang jelas. Terkait soal sosok Anies Baswedan misalnya, diakui Maya sebagai orang panutan yang layak menjadi pemimpin Indonesia ke depan.

Sebagai seorang akademisi, dia meyakini Anies bukan tipe greedy atau tidak rakus dengan kekuasaan. Hidupnya adalah pengabdian. Sehingga saat Nasdem memilih Anies langkah yang tepat.

Sementara sosok Muhaimin Iskandar juga merupakan pilihan yang tepat terutama dalam meraup simpati di Pulau Jawa khususnya Jawa Timur.

“Sehingga memilih Cak Imin adalah pilihan yang tepat. Kalau dalam survei selalu berada di nomor tiga, ya sejak dari Pilgub DKI dulu, pak Anies selalu di peringkat tiga tapi pada kenyataannya menang,” tegasnya.

Maya berpendapat, politik itu bukan hitam dan putih atau bukan hanya mencari menang dan kalah tetapi bagaimana membangun Indonesia lebih baik dengan merangkul semua orang.

Sehingga politik itu tidak perlu saling menjatuhkan dan menjelekkan seperti yang dialami Anies Baswedan yang dituding lebih mengedepankan identitas keagamaan. ●RDR





“Saya sekarang di PDIP dan terasa luar biasa bagi saya. Inilah pencarian terakhir saya di dunia politik bersama PDIP”

Anton Nurdin

KUTU LONCAT YANG INGIN MEMBERI MANFAAT

Meski saat ini bergelut dengan dunia olahraga namun darah politik sepertinya juga ikut melekat pada diri dan jiwa Anton Nurdin. Sempat beberapa kali berpindah partai, dia akhirnya memutuskan memilih PDIP sebagai pencarian terakhirnya di dunia politik.

Nama Anton Nurdin mungkin tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Palembang khususnya dari kalangan olahraga karena dia menjabat sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Palembang. Namun sebelumnya dia juga sempat mengenyam kursi legislatif dari partai yang berbeda.

“Mungkin orang banyak mengatakan saya ini politisi kutu loncat, yah dak apa-apa memang begitu adanya. Tapi kutu loncat saya selalu memberi manfaat bukan yang lain-lain. Setelah sempat beberapa kali pindah partai sepertinya PDIP menjadi pilihan saya yang terakhir karena terasa pas di hati,” demikian kata Anton Nurdin.

Saat ini Anton Nurdin mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Palembang dari daerah pemilihan (Dapil) 1 Kota Palembang yang meliputi Kecamatan Ilir Barat (IB) 1, Ilir Barat (IB) 2, Bukit Kecil dan Kecamatan Gandus dengan nomor urut 7.

Duduk di kursi legislatif bukan hal baru bagi Anton Nurdin. Pada tahun 2004-2009 silam dirinya sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten OKU Timur dari Partai Golkar. Saat itu dia menjabat sebagai Sekretaris Partai Golkar OKU Timur.

Kemudian bergabung ke Partai Demokrat di Pemilu 2009-2014 dan sempat menjabat anggota DPRD Sum-sel melalui jalur Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan jabatan sebagai Sekretaris Partai Demokrat Kota Palembang.

Selanjutnya sempat menekuni dunia advokat atau dunia hukum sekaligus menjabat sebagai Ketua KONI Kota Palembang.

Di Pemilu 2024 ini, Anton Nurdin kembali ke dunia politik dengan bergabung di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Saya sekarang di PDIP dan terasa luar biasa bagi saya. Inilah pencarian tera-

akhir saya di dunia politik bersama PDIP,” terangnya.

Makanya banyak yang menyebut dia sebagai politisi Kutu Loncat, karena sudah beberapa kali pindah-pindah partai.

“Sebutan Kutu Loncat konotasinya tidak bagus memang, namun saya selalu menjelaskan, saya memang kutu loncat tapi perlu di garis bawah saya tidak makan darah tapi memberi manfaat kepada masyarakat,” terangnya.

Majunya dia menuju kontestasi pada Pemilu 2024 ini tentunya tidak lepas dari dukungan keluarga besar, teman, sahabat serta dukungan dari partai tentunya. Sehingga dia yakin

dapat merebut simpati masyarakat melalui program-program yang dirinya miliki dan berkeyakinan dapat memenangkan suara di Dapil 1 tersebut.

“Saya berkeyakinan dapat menarik simpati masyarakat melalui program yang akan kita sampaikan pada masyarakat, dengan niat tulus dan niat bagus InsyaAlah apa yang diharapkan masyarakat akan kita sampaikan dan salurkan, semoga bisa direalisasikan saat kita duduk di kursi DPRD nanti,” terangnya.

Anton juga selalu berkoordinasi dan akan membentuk tim pemenangan untuk menampung apa yang menjadi keinginan masyarakat di Dapil tempatnya bertarung memperebutkan suara dan menarik perhatian masyarakat melalui program-program yang telah kita siapkan, dirinya berkeyakinan dapat mendulang suara terbanyak di Dapil 1 tersebut.

“Kebetulan Dapil 1 Ini merupakan tempat saya kecil dan tempat saya bermain khususnya yaitu daerah Ilir Barat (IB) 1. Ketika saya membentuk tim p e m e n a n g a n d i

Dapil 1 ini, akan lebih mudah untuk menyampaikan ataupun mendengarkan aspirasi yang jadi keinginan masyarakat,” tegas advokat ini.

Kagum dengan Keputusan Megawati

Anton Nurdin merasa bangga sebagai Caleg PDIP karena melihat sosok bijaksana dan kharismatik dari Megawati Soekarnoputri. Hal itu terlihat saat menunjuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Capres dan Cawapres. Dimana kedua tokoh ini merupakan sosok luar biasa dan menjadi panutan saat ini.

“Yang satu kharismatik dan yang satunya adalah tokoh yang sudah sangat dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, saya yakin pasangan (Ganjar-Mahfud) ini akan mampu merubah bangsa ini menuju kearah yang lebih baik lagi,” terangnya.

Disisi lain dia melihat sosok negarawan dari Megawati yang lebih mengedepankan kepentingan bangsa daripada ambisi pribadi. Sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati bisa saja mengusung anaknya Puan Maharani sebagai Capres atau Cawapres namun hal itu tidak dilakukannya.

“Ibu Mega ini tidak mementingkan kepentingan pribadinya. Kalau beliau haus kekuasaan mengapa tidak nama anaknya yang disandingkan dengan sosok Ganjar Pranowo untuk menuju kursi Presiden. Padahal kan sama kita ketahui PDIP bisa mengusung secara langsung calon presiden dan wakil presiden meski tanpa berkoalisi dengan partai lain,” ungkapnya.

Dia menilai ada harapan besar pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini karena bisa menjadikan Indonesia lebih maju dan hebat lagi.

“Ganjar-Mahfud ini merupakan pasangan terbaik dari pasangan paling baik. PDIP tidak bercerita tentang pasangan yang memiliki kekayaan yang luar biasa tetapi bercerita bagaimana membawa bangsa ini menuju kearah yang lebih baik lagi dan tidak memainkan politik identitas,” tegasnya.

Hal ini pula yang memotivasinya untuk membawa PDIP sebagai partai pemenang terutama di Pileg Kota Palembang.

Disisi lain mereka juga tidak terlalu kehilangan dengan sosok Jokowi yang di Pemilu 2024 ini sepertinya tidak bersama PDIP lagi. Situasi politik ini sudah bukan hal baru bagi partainya bahkan PDIP berjuang dari nol dan bukan lahir atau terbit dari kekuasaan.

“Ini menjadi tugas kader-kader PDIP untuk merebut kembali karena saat ini masih memegang penuh dan menguasai legislatif. Kita masih ingat di masa Orde Baru (Orba) bagaimana PDIP ini dikerdilkan namun mampu bangkit dan menjadi partai besar hingga saat ini,” terangnya.

Di pencalonannya kali ini Anton Nurdin berharap sukses duduk di kursi legislatif dan akan mendedikasikan waktunya untuk membantu masyarakat khususnya di Kota Palembang seperti yang dia lakukan dulu. •RDR



“Pemimpin yang mumpuni saat ini adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan mereka punya keistimewaan. Anies adalah seorang intelektual muslim, Muhaimin adalah Islam nasionalis”

Zain Ismed



KADER NASDEM BANGGA PUNYA ANIES-MUHAIMIN

Keputusan Koalisi Perubahan untuk memilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin adalah keputusan tepat. Meski dianggap sebagai kuda hitam namun para kader partai pendukung bangga punya pasangan Anis - Cak Imin yang memberikan harapan besar menuju Indonesia lebih baik dan sesuai cita-cita awal bangsa Indonesia.

Kebanggaan itu disampaikan para kader Partai Nasdem di daerah yang merasa bersyukur mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon Presiden Indonesia.

Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor yang kini bergabung dengan Partai Nasdem, Hendra Yospin mengaku sangat bersyukur Surya Paloh memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden. Bahkan dia sudah memprediksi sejak Anies masih duduk di bangku SMA kalau dia adalah bakal menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Secara personal, Hendra Yospin yang merupakan mantan hakim Ad Hoc Tipikor selama 10 tahun itu memandang Anies Baswedan sebagai orang terbaik saat ini untuk memimpin Indonesia.

“Orangnya terpelajar, punya pandangan masa depan yang jelas. Prestasinya luar biasa baik nasional maupun internasional. Dia juga bahkan mendapat penghargaan dari KPK. Itu artinya dia bersih. Dia juga intelektual dan teruji,” ungkap Caleg DPR RI Dapil 2 Sumatera Selatan ini.

Hal itu diperkuat dengan sosok Muhaimin Iskandar yang secara karakter juga sama-sama kuat. Sehingga baik Capres dan Cawapres kemampuannya seimbang.

“Dari tiga Capres hanya Amin yang pas di Pemilu 2024. Bagi saya pribadi, kita butuh perubahan sekarang. Di bidang pendidikan, kesehatan semua butuh perubahan. Kalau pak Anies jadi presiden semua itu akan berubah menjadi lebih baik lagi,” terangnya.

Untuk itu Hendra berharap seluruh masyarakat Indonesia bisa memilih Anies Baswedan sekali ini untuk membangun sistem negara yang lebih baik lagi. Kalau sistem terbangun sudah baik silahkan memilih yang lain.

Sebagai orang hukum, Hendra juga tentu ingin berkontribusi banyak pada negara utamanya perbaikan di bidang hukum. Sehingga dia juga butuh jalan untuk membuka ruang, salah satunya menjadi anggota dewan dengan tujuan mendukung penuh Anies melakukan perubahan.

“Saya akan beri masukan bisa lewat lisan, tulisan atau terserah. Soal mau dipakai atau tidak terserah yang penting saya

bisa menyalurkan gagasan tentang perbaikan hukum yang lebih baik lagi. Makanya saya sangat tertarik dengan Anies Baswedan,” ujarnya.

Sekarang ini lanjut Hendra, orang ingin berkarir saja bukan dilihat dari prestasi tapi berani setor berapa. Hal ini banyak terjadi dialami para pejabat-pejabat di pemerintahan sehingga profesionalismenya dipertanyakan.

Kemudian soal keadilan, banyak orang yang tidak berkompeten tapi karena anak pejabat maka ditempatkan di kota-kota. Sementara orang yang punya prestasi baik tapi bukan siapa-siapa ditempatkan di daerah terpencil. Praktek-praktek semacam itu banyak terjadi sekarang.

Bahkan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di masa sekarang tambah parah.
S e -

hingga sudah saatnya berubah. Termasuk juga saat pencalegan harusnya ada fit and proper test.

“Apakah korupsi ini bisa diubah, yah bisa. Kalau mau kaya mungkin sudah dari dulu karena orang itu mengantarkan uang sampai ke rumah tapi tidak saya lakukan itu. Orang atau hakim jujur itu masih ada dan banyak namun mereka ditempatkan di kota,” ungkapnya.

Bahkan Hendra sudah tidak heran lagi melihat banyak pejabat penegak hukum yang terlihat sukses, hebat dan gagah dengan jabatannya bukan karena prestasi tapi karena berani mengambil resiko. Sementara mereka yang jujur sulit terpilih atau karirnya naik karena tidak bisa menyeter ke atasan.

Sikap optimis juga disampaikan Zain Ismed, Wakil Ketua Partai Nasdem Sumsel bidang Informasi dan Komunikasi.

Selama ini banyak cara untuk mengganjal Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia. Salah satunya dengan mengumbar isu politik identitas yang seolah-olah berpihak pada satu

keyakinan saja.

Faktanya, Anies Baswedan terbukti selama memimpin DKI Jakarta memberikan perubahan yang lebih baik dan tidak ada dia membawa isu-isu politik identitas.

“Jadi isu politik identitas itu hanyalah sebuah framing saja untuk menjatuhkan Anies Baswedan supaya tidak simpati. Jadi itu fitnah karena faktanya tidak begitu. Bahkan seluruh umat beragama manapun dia bantu. Gereja dia bantu, saudara-saudara dari Tionghoa dia bantu, semua dia bantu,” terang Zain Ismed.

Zain Ismed menegaskan, keluarga Anies Baswedan itu adalah keturunan pejuang kemerdekaan tanah air. Sehingga darah pejuang itu tidak akan dikhianati Anies.

Bahkan dalam setiap pidato-pidatonya Anies Baswedan ingin mengembalikan tujuan bangsa ini seperti semula yang mungkin dalam ada penyimpangan-penyimpangan. Kita juga sebenarnya ingin agar negara ini dikembalikan seperti founding father dibentuk yakni kesejahteraan dan keadilan,” terang Ketua Dewan Koperasi Indonesia (DKI) Sumsel ini.

Mantan Sekretaris Perusahaan PT Pusri ini mengatakan, kesejahteraan mungkin bisa dicapai sekelompok orang tapi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun faktanya tidak semua mendapat keadilan.

“Kita harus punya pemimpin yang kuat secara idealisme, konsep dan integritas. Pemimpin yang mumpuni saat ini adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan mereka punya keistimewaan. Anies adalah seorang intelektual muslim, Muhaimin adalah Islam nasionalis.

Mereka bisa menjaga bangsa ini dan amanah. Pasangan ini sangat solid jadi Capres dan Wapres.

Indonesia membutuhkan perubahan. Perubahan yang dimaksudkan adalah perlu restorasi segala bidang dengan mengembalikan tujuan semula saat negara ini dibentuk. Bila yang kurang maka ditambah agar lebih baik dan menyempurnakan sistem yang sudah baik.

Hanya saja perubahan ini di frame lagi kalau perubahan itu adalah membongkar semua. Padahal tidak seperti itu. Perubahan itu yakni mengevaluasi bagaimana arah bangsa ini.

Misal seperti di bidang politik, saat ini money politik berkembang yang merusak sistem politik kita. Arah ekonomi juga perlu diperbaiki karena harus ada pemerataan.

“Pemerataan ini harus dirasakan rakyat Indonesia bukan hanya milik orang-orang tertentu atau oligarki,” terangnya.

Namun untuk melakukan perubahan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Mulai dari lingkungan sendiri seperti di partai. Di Partai Nasdem sendiri sudah punya komitmen untuk tidak menggunakan politik uang.

Sementara di lingkungan lebih luas seperti masyarakat memang membutuhkan edukasi yang ekstra karena hal itu berpengaruh terhadap faktor ekonomi, pendidikan dan kondisi sosial. Sehingga perlu melakukan edukasi ke masyarakat dengan bicara dari hati ke hati. ●RDR





“Di Pilpres 2024 pilih Jokowi terpecah dua ada yang ke Prabowo dan Ganjar. Pasangan AMIN tetap punya peluang asalkan kader PKB di Sumsel secara masif bergerak,”

Fatkurohman

INFO
DAPIL

Minggu II • November 2023

17

CAK IMIN LEBIH DIKENAL PEMBUKTIAN SOLIDITAS PKB

Pada Pilpres 2024 ini suara masyarakat Jawa sangat menentukan. Bukan hanya tersebar di Pulau Jawa tapi ke seluruh wilayah Indonesia. Dari tiga nama pasangan calon presiden (Capres) hanya Anies Baswedan yang sedikit ‘terdengar asing’ bagi pemilih masyarakat Jawa khususnya di Sumatera Selatan.

Namun uniknya nama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin lebih populer di mata masyarakat sehingga hal ini tentu menjadi pembuktian bagi seluruh kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk memenangkan pasangan AMIN.

Patut diakui, melihat dinamika yang ada masyarakat Jawa di Sumatera khususnya Sumsel lebih mengenal nama Ganjar Pranowo - Mahfud MD dan Prabowo Subianto - Gibran. Hal ini tergambar jelas secara demografi karena sebagian besar masyarakat Jawa di Sumsel ada di pedesaan.

“Di Pilpres lalu, mereka sebagian besar memilih Jokowi. Di Pilpres 2024 pilih Jokowi terpecah dua ada yang ke Prabowo dan Ganjar. Pasangan AMIN tetap punya peluang asalkan kader PKB di Sumsel secara masif bergerak,” ungkap pengamat politik dari Public Trust Institute (Putin), Fatkurohman.

Secara umum kecenderungan masyarakat Jawa di Sumsel lebih mengenal Ganjar dan Prabowo serta Muhaimin Iskandar. Sementara Anies Baswedan banyak dikenal masyarakat lokal dan etnis Melayu serta warga perkotaan.

Untuk memaksimalkannya PKB harus mengerahkan seluruh kadernya karena mereka punya kantung-kantung tersendiri seperti di wilayah Kecamatan Sungai Lilin dan sekitarnya, sebagian Banyuasin serta di wilayah Kabupaten OKU Timur.

“Basis-basis lainnya ada di pondok-pondok pesantren dan suara masyarakat Nahdlatul Ulama di desa-desa. Untuk mengimbangi suara pendukung Ganjar dan Prabowo, kader PKB harus bergerak total,” ungkapnya.

Sehingga kader PKB punya peran penting menyapa masyarakat Jawa di Sumatera Selatan agar bisa

mengimbangi perolehan suara dari Ganjar dan Prabowo.

Fatkurohman sendiri memprediksi PKB bisa menyumbang sekitar 7 persen dari 30 persen masyarakat Jawa di Sumsel. Sementara suara Anies secara keseluruhan 20 persen sehingga bisa mencapai 27 persen.

“Tapi kita juga melihat dinamika politik yang ada dulu. Secara umum tiga kandidat ini sama kuat dengan persentase di atas 30. Suara paling menentukan tentu ada di Kota Palembang yang dinamikanya cukup tinggi,” ujarnya.

Sehingga bisa saja, di masyarakat Jawa Sumatera, pasangan AMIN kurang populer namun secara total mereka bisa menang.

Di sisi lain dua paslon lainnya pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD sebelumnya sudah mulai tebar persona untuk berburu suara masyarakat Jawa di Sumsel.

Gubernur Paguyuban Republik Ngapak Sumsel Mukhtarudin Muchsiri menjelaskan, warganya sudah terhubung dengan paslon Ganjar Pranowo - Mahfud MD secara ikatan etnis. Kondisi itu menjadi faktor fundamental paslon lain khususnya AMIN yang kurang tenar di mata mereka sehingga akan sulit mendapatkan suara warga Ngapak di Sumsel.

“Secara teritorial warga Ngapak akan memilih calon presidennya yang dahulunya adalah Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo. Ikatan emosional etnis antara Ganjar dan warganya Ngapak di Sumsel sudah erat. Kalau AMIN kurang terlalu tenar di mata warga Ngapak di Sumsel seperti ini sulit,” kata dia.

Diakuinya kunjungan Ganjar ke Sumsel pada 6

November 2023 lalu, ke Kecamatan Sungai Lilin Muba dan Desa Kali Bening Musi Rawas untuk bertemu secara khusus warga Ngapak di Sumsel.

Dari pertemuan tersebut terlihat jelas warganya memiliki ikatan etnis dengan mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu. Bahkan sebelum mencalonkan diri sebagai Capres di Pilpres 2024 dia bersama warga Ngapak diundang Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah di kantornya.

“Ganjar tilik sedulur Ngapak di Sumsel itu agenda kedatangan beliau. Bahkan saat bertemu warga Ngapak Ganjar menggunakan bahasa Ngapak seakan-akan datang memang mau bertemu dengan keluarga sendiri di Sumsel,” jelasnya.

Namun tidak menutup kemungkinan pasangan AMIN masih bisa mendapatkan beberapa persentase suara asalkan dukungan kekuatan mesin Partai PKB dan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama atau NU bisa bergerak maksimal.

Hal itu karena ada faktor yakni sebanyak 360 pondok pesantren di Sumsel milik NU bisa memobilisasi massa warganya. Apabila mesin Partai PKB benar-benar bergerak maksimal bisa saja akan ikut meraup suara dari warga Ngapak di Sumsel yang terafiliasi NU.

Paslon AMIN yang dikenal dengan Anies Baswedan didukung masyarakat berpendidikan menengah keatas dengan islam modernnya. Lalu Cak Imin atau Muhaimin Iskandar didukung PKB diisi kaum berpendidikan menengah kebawah bahkan para kadernya tersebar kabupaten dan desa di Sumsel. Sehingga bisa saja mencuri hati suara warga Ngapak berafiliasi dengan NU dan PKB.

“Kecuali paslon Prabowo

kami sudah benar-benar sangat kecewa, walaupun tenar dengan adanya Gibran tetapi tidak menjamin. Kami juga menilai Gibran mampu mewakili kaum muda tetapi warga Ngapak di Sumsel sudah terlanjur kecewa,” pungkasnya.

Ketua Aliansi Masyarakat Pujakesuma Sumsel Lilik Agus Purwanto menilai turunya pamor paslon Anies Baswedan dan Cak Imin efek dari Pilgub Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Saat itu Anies Baswedan sangat lekat sosoknya memiliki figur politik identitas yang sangat kental.

“Prabowo Subianto juga lekat dengan politik identitas namun Anies Baswedan lebih kental khususnya saat Pilgub DKI Jakarta. Anies Baswedan muncul dengan agama modernnya gerakan 212 membuat masyarakat Pujakesuma Sumsel jadi kurang tertarik untuk meliriknya sentimentilnya politik identitas itu belum hilang,” kata dia.

Namun dia melihat Anies Baswedan masih bisa mendapatkan suara dari masyarakat Pujakesuma Sumsel dari pendukung Cak Imin. Sentimentil politik identitas melekat di Anies Baswedan bisa saja mencari alternatif lain.

“Posisinya sekarang ada Cak Imin tidak bisa diragukan lagi bisa membantu Anies Baswedan untuk meng-clear-kan sistem terhadap masyarakat Pujakesuma anti Anies,” jelasnya.

Agus sendiri tidak begitu tahu faktor utama Anies kurang populer bagi masyarakat Pujakesuma di Sumsel selain sentimentil politik identitas Anies Baswedan.

Namun dia optimis paslon AMIN bisa merangkak naik pamornya kedepan dengan adanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Tidak hanya di masyarakat Pujakesuma Sumsel semua penduduk Provinsi Sumsel bisa saja nanti akan merapat ke AMIN. Partai PKB memiliki massa yang besar di seluruh kabupaten dan desa-desa,” tuturnya

Cak Imin memiliki aura kaum nahdliyin merupakan Islam tradisional banyak sekali dianut masyarakat Pujakesuma. Anies dengan islam modern membuat figurnya bisa terpengaruh pamor Islam tradisional hingga melekatnya politik identitas bisa hilang.

Uniknya orang Jawa itu suka melihat gerak gerak bahasa tubuh seseorang. Melihat Anies nanti akan menerapkan cara berdoa dan kehidupan mirip NU citra Islam modern dari Anies Baswedan itu bisa melunturkan sentimentil masyarakat.

•RDR



"Jika ada yang melakukan pelanggaran sebelum waktunya akan kami kenakan sanksi diantaranya adalah sanksi pidana. Sampai sejauh ini untuk di Sumsel belum ada"

Kurniawan



KENDALI KPU SUMSEL DIAMBIL ALIH PUSAT

Sejak tanggal 7 November 2023, seluruh komisioner di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Sumsel berakhir masa jabatannya dan tidak ada satupun yang diperpanjang. Dampaknya KPU Sumsel kini tanpa tuan hingga akhirnya diambil alih KPU RI dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Tahapan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024 akan memasuki masa kampanye pada 28 November 2023. Sementara pemungutan suara dalam pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) akan digelar 14 Februari mendatang.

Namun, jabatan Komisiner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) berakhir pada 7 November 2024 lalu. Banyak yang bertanya-tanya soal kekosongan jabatan komisiner ini, siapa yang akan mengerjakan urusan Pemilu serentak jika tidak ada penyelenggara, khususnya di Sumsel.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari menegaskan, ketiadaan komisiner KPU Provinsi Sumsel lantaran habis masa jabatan akan diambil alih KPU RI.

"Tanggung jawab dan pekerjaan kita (KPU RI) ambil alih," ujarnya di Pemprov Sumsel.

Seperti dalam Penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Pendanaan Pilkada Serentak tahun 2024 yang dilakukan di Auditorium Graha Bina Praja, Kamis (9/11), Hasyim mewakili KPU Sumsel mengambil alih pekerjaan komisiner.

Dirinya menandatangani surat NPHD itu bersama Bawaslu Sumsel dan Pj Gubernur Sumsel.

Pengambilalihan pekerjaan Komisiner KPU yang habis masa

jabatan bukan sekali ini saja dilakukan KPU RI.

Belum lama ini, pihaknya pernah menghandle pekerjaan KPU Aceh karena juga habis masa jabatan. Total, sudah ada 12 KPU di provinsi yang pernah diambil alih pihaknya.

"Kita mengambil alih pekerjaan komisiner yang habis masa jabatan merupakan hal biasa, tahapan-tahapan Pemilu serentak 2024 juga tidak akan terganggu, masih tetap on-schedule, biasa-biasa saja kok," katanya.

Ia menjelaskan, penugasan KPU RI di KPU Sumsel ini akan berakhir setelah ada komisiner yang baru. Saat ini, katanya, masih dalam tahap penilaian.

"Secepatnya akan kita umumkan jika sudah ada keputusan siapa komisiner di KPU Sumsel. Apakah seminggu ini? Mudah-mudahan bisa secepatnya komisiner KPU dilantik," ungkapnya.

Ia menyebut, kondisi masyarakat di Sumsel menjelang Pemilu serentak dalam keadaan baik. Menurutnya, Sumsel termasuk dalam wilayah yang positif dan baik.

"Masyarakat di Sumsel punya kultur menjaga perdamaian, rasa persaudaraan yang kuat. Hal itu berkaca dari kontestasi Pemilu sebelumnya-sebelumnya," kata Hasyim.

Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan tahapan penetapan Capres dan nomor urutnya pada 24 November mendatang. Pada pertengahan November pula, pihaknya akan bersiap mencetak surat suara.

Saat ini pihaknya masih menunggu persetujuan dari parpol soal desain yang telah dibuat.

Baik untuk desain Pileg di DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Sementara desain Pilpres masih menunggu penetapan pasangan calon.

"Total desain ada 2.749 daerah pemilihan yang kita

siapkan, termasuk di wilayah Sumsel," tukasnya.

Penandatanganan NPHD ini merupakan komitmen Pj Gubernur Agus Fatoni men-sukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sumsel tahun 2024.

"Hari ini sudah ditandatangani NPHD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel terkait dana Pilkada. Saya ucapkan terimakasih kepada Bupati dan Walikota yang telah berkomitmen penuh sehingga anggaran pilkada 40 persen tahun 2023 telah disediakan," jelasnya.

Fatoni mengatakan, anggaran dana Pilkada tahun 2024 ini terdiri dari bermacam-macam. Ada anggaran tersebut memang sudah dianggarkan dalam APBD murni dan ada juga yang dilakukan perubahan di APBD Perubahan. Bahkan ada juga sebagian yang justru tidak dianggarkan dari kedua cara tersebut.

"Untuk yang tidak dianggarkan keduanya itu kita lakukan pergeseran anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT)," jelas Fatoni.

Terkait penggunaan BTT kata Fatoni mulanya banyak Bupati/Walikota yang masih ragu. Namun dengan pemahaman yang ia berikan sekaligus sebagai Dirjen Bina Keuangan Kemendagri perlahan kepala daerah menjadi yakin dan tidak ragu lagi dalam menganggarkan dana untuk Pilkada.

Lebih jauh Fatoni mengatakan penandatanganan NPHD ini juga menjadi bentuk cinta para kepala daerah, KPU dan

Bawaslu kepada bangsa dan negara. Pasalnya penandatanganan ini menjadi bukti komitmen

mereka dalam mendukung terlaksananya Pilkada Serentak 2024 mendatang di Sumsel.

Fatoni juga berpesan kepada semua kepala daerah tetap menjaga status Sumsel sebagai daerah yang zero konflik. Ia berharap jalannya Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berlangsung sukses agar bangsa dan daerah menjadi jauh lebih baik lagi.

"Namanya pesta ini harus dilakukan dengan gembira jangan menjadi beban. Harus dilaksanakan sepenuh hati. Dan sebisa mungkin kita jaga dan pertahankan lingkungan agar tidak terjadi perpecahan," kata Fatoni.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Pj Gubernur Sumsel, pimpinan DPRD dan DPRD yang sudah menyepakati untuk pemilihan Gubernur di Sumsel anggaran yang disediakan sekitar Rp 234 miliar dan dibagi dua porsi.

Porsi pertama 40 persen tahun 2023 atau sekitar Rp 93 miliar dan nanti di tahun 2024 senilai Rp 140 miliar yaitu 60 persen.

"Untuk total pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota se Sumsel berdasarkan kontribusi APBD provinsi dan kabupaten/kota totalnya sekitar Rp 1 triliun lebih sekian miliar. Kami atas nama KPU mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah Provinsi Sumsel, pemerintah kab/kota se Sumsel dalam menyelenggarakan pilkada serentak 2024," jelasnya.

Adapun rincian anggaran dana Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berdasarkan data dari Kesbangpol Provinsi yakni Kumulatif KPU se-Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar Rp.416.918.651.985 dan tahun 2024 sebesar Rp.637.059.959.605.

Selanjutnya, kumulatif Bawaslu se-Sumatera Selatan Tahun 2023 sebesar Rp.137.700.016.432 dan tahun 2024 sebesar Rp.215.277.551.648.

Sementara itu Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan menjelaskan, memang dari penetapan DCT kemarin sampai masa kampanye nanti sosialisasi diakui masih bolong, dan saat ini belum masa kampanye. Kampanye baru akan dilakukan tanggal 28 November mendatang.

"Jika ada yang melakukan pelanggaran sebelum waktunya akan kami kenakan sanksi diantaranya adalah sanksi pidana. Sampai sejauh ini untuk di Sumsel belum ada," tegas Kurniawan.

Untuk kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Sumsel saat ini adalah partai politik atau Caleg terkadang tidak memberitahukan kalau ada kegiatan.

"Tapi untuk sosialisasi di internal partai diperbolehkan namun tetap dalam pengawasan, dan sudah kita beri himbauan kepada partai politik untuk melaporkan atau memberi tahu ke Bawaslu apapun bentuk kegiatannya. Kami khawatir kalau tidak ada pemberitahuan dan kita tidak mengawasi ditakutkan ada sosialisasi yang mengarah ke kampanye," tutur Kurniawan. ●RDR





“Sumsel masyarakatnya religius dan nasionalis sangat bagus iklimnya untuk AMIN mendulang banyak suara di sini”

Momon Wahyudi

INFO
DAPI

Minggu II • November 2023

19

SUMSEL LADANG SUARA RELIGIUS AMIN OPTIMISTIS MENANG

Meski selalu berada di peringkat ketiga dalam hasil survei atau bahkan dianggap pasangan calon presiden (Capres) kuda hitam di Pilpres 2024 namun Koalisi Indonesia Perubahan (KIP) optimis bisa mendapatkan tren positif mendulang 70 persen suara untuk paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) di Sumatera Selatan.

Hasil tersebut yakin tercapai oleh seluruh kader partai koalisi karena Sumsel dikenal masyarakat sebagai daerah Islami dan religius dalam kontestasi Pilpres 2024. Bahkan seluruh kader partai koalisi bersemangat memenangkan pasangan AMIN sekaligus membuktikan kalau hasil survei bukan suatu pembuktian.

Bagi para kader partai Koalisi Indonesia Perubahan, mereka tidak terlalu peduli dengan hasil survei karena faktanya di setiap kegiatan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selalu ramai bahkan membludak.

Di Sumatera Selatan sendiri, suara Anies Baswedan diyakini cukup besar terutama di wilayah perkotaan. Suara itu akan semakin besar bila seluruh kader partai koalisi saling bahu membahu memenangkan pasangan AMIN.

Kader Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus menyapa masyarakat sekaligus bertekad memenangkan AMIN di Sumsel dan Pulau Sumatera.

Caleg DPR RI Partai PKB Momon Wahyudi menjelaskan, suara untuk AMIN di Sumsel bisa dimaksimalkan hanya saja sebelumnya memang mesin partai belum dipanaskan saja. Nanti kedepannya pamor AMIN di Sumsel tentunya jauh akan meningkat dibandingkan kontestan lainnya di Pilpres 2024.

“Sumsel masyarakatnya religius dan nasionalis sangat bagus iklimnya untuk AMIN mendulang banyak suara disini. Karena kita memang belum memaksimalkan untuk memperkenalkan pasangan ini secara maksimal saja,” kata dia.

Belum maksimalnya sosialisasi AMIN di Sumsel disebabkan belum ditetapkan secara resmi oleh KPU. Sehingga pengenalan atau sosialisasi AMIN kepada konstituen baru terlaksana secara spontan dan tidak resmi sehingga terkesan tidak maksimal.

Mereka tidak mau dituding melakukan pelanggaran Pemilu sehingga akan merusak dan merugikan pasangan AMIN di Pilpres 2024 mendatang.

“Penetapan calon pasangan presiden dan wakilnya seperti istilahnya belum keluarnya DCT kalau caleg. Setelah penetapan sudah pasti baru kita memaksimalkan. PKB sendiri bahkan akan melakukan sosialisasi AMIN secara mandiri kepada masyarakat di Sumsel,” tuturnya.

Jadi berdampak kurangnya pamor AMIN di Sumsel karena belum adanya sosialisasi disengaja oleh Koalisi Indonesia Perubahan, kesepakatan untuk mengikuti aturan penyelenggara Pilpres 2024 menjadi alasan utama.

“Karena kita tidak mau mencuri start kampanye jadi ikuti aturan saja. Jadi wajar kalo AMIN kurang pamor kemarin-kemarin karena sosialisasi hanya dilakukan secara spontan saja,” ungkapnya.

Sekarang PKB sudah memanaskan mesin untuk memulai sosialisasi secara resmi dan besar-besaran. Hal itu disebutkan Momon Wahyudi karena pihak mereka sudah mementahkan suara untuk Anies dan Muhaimin atau AMIN.

“Suara kita fokus kepada masyarakat Sumsel yang Islami karena peluang untuk mendulang suara akan kita dapatkan dari mesin PKB. Kemudian masyarakat nasionalis juga bisa kita dapatkan makanya PKB akan melakukan sosialisasi sendiri untuk mengejar elektabilitas AMIN di Sumsel,” jelasnya.

Momon tidak mau menyebutkan partai Islam terbesar di Indonesia NU untuk terlibat di politik, karena baginya antara NU dan PKB diibaratkan buku nahdliyin yang berbeda. Namun semua orang tahu PKB adalah partai terlahir dari rahim NU.

Bahkan adanya dua paslon di Pilpres 2024 berasal dari NU dijamin Momon suara NU tidak akan terpecah bahkan semakin bulat ke Cak Imin bukan ke Mahfud MD.

“Justru suara PKB semakin bulat karena yang mencalonkan ini adalah Ketua Umum. Namun memang ada suara-suara NU yang tidak afiliasi NU, ini yang akan kita rangkul untuk bersama PKB mendukung Cak Imin,” kata dia.

PKB optimis bisa mengambil suara di Sumsel karena partai mereka banyak sekali program-program di pedesaan. Bahkan optimis juga bisa merangkul warga Jawa yang ada di Sumsel nilainya banyak terafiliasi dengan NU.

Sementara Ketua DPW PKS Sumsel, Muhammad Toha Oni mengatakan, Koalisi Indonesia Perubahan menjelaskan, Tim Pemenangan Wilayah (TPW) AMIN Sumsel telah terbentuk dan Sekretariat telah diresmikan Cawapres Muhaimin

Iskandar.

“Setelah itu TPW Anies Sumsel telah bergerak memastikan agar TPD di kabupaten/ kota Sumsel juga agar segera terbentuk,” kata dia.

Ketenaran AMIN disebutkannya sudah mulai terbentuk di Sumsel karena PKS pernah menggelar acara dan antusias masyarakat sangat baik. Hanya saja sosialisasi secara intens memang belum dilaksanakan karena saat itu belum terbentuknya tim pemenang.

“Menurut kami justru pak Anies cukup tenar di Sumsel, terbukti ketika PKS Sumsel mengundang beliau tgl 10 September 2023 yang lalu diantaranya dalam acara Senam Sehat Bersama Anies warga sangat antusias menghadiri acara tersebut,” jelasnya.

Langkah koalisi TPW kedepannya untuk mendukung kemenangan AMIN dengan beragam program yang akan disusun. PKS juga akan melakukan sosialisasi kemenangan AMIN secara mandiri demi terwujudnya kemenangan di Pilpres 2024.

“Diantaranya memperbanyak silaturahmi ke berbagai kalangan dalam rangka lebih mengenalkan dan memastikan kemenangan pasangan AMIN. Insya Allah target 70 persen akan kita dapatkan suara dari masyarakat di Sumsel,” jelasnya.

Sejauh ini tim AMIN tidak terlalu peduli dengan berbagai hasil survei karena fokus utama mereka adalah memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dimana ada banyak harapan yang mereka gantungkan bila pasangan ini menang di Pilpres 2024 mendatang. ●RDR



“PPATK menilai bahwa adanya potensi money politic dengan menggunakan e-money dan e-wallet”

Ivan Yustiavandana



DANA PEMILU HARUS HALAL

Komisi III DPR mengingatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mewaspadai potensi kejahatan keuangan yang meningkat jelang Pemilu 2024.

“Tapi meski begitu, PPATK jangan sampai jadi lengah. Apalagi sekarang menjelang pemilu, potensi kejahatan keuangan jelas bisa meningkat. Makanya, PPATK perlu terus menjaga kinerjanya demi memastikan pemilu yang dananya 100 persen halal,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, di Jakarta, Kamis, 9 November 2023.

Sahroni mengaku mengkhawatirkan celah kejahatan keuangan baru lantaran perputaran uang yang meningkat di tahun pemilu.

“Menjelang pemilu, perputaran uang di segala sektor sudah pasti meningkat. Agar kondisi ini tidak dimanfaatkan oknum, PPATK harus bisa cermat dalam melihat dan mencegah potensi-potensi modus kejahatan keuangan baru karena khawatir ada berbagai upaya yang memang dimaksudkan untuk mengintervensi pemilu kita menggunakan dana-dana hasil kejahatan tersebut,” ujarnya.

Bendahara Umum Partai Nasdem ini juga mengimbau hal tersebut karena tak ingin kontestasi Pemilu 2024 dirusak oleh dana-dana ilegal yang bila dibiarkan akan menimbulkan kekacauan situasi.

“Uang haram yang dicari dengan cara ilegal sudah pasti dimaksudkan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan. Jadi kalau ini dibiarkan, bisa chaos situasi Pemilu 2024,” ucapnya.

Di sisi lain, Sahroni mengapresiasi kinerja PPATK di bawah kepemimpinan Ivan Yustiavandana yang berhasil mengungkap transaksi terkait investasi ilegal bernilai fantastis selama tahun 2022.

“Komisi III mengapresiasi kinerja luar biasa PPATK. Walau bergerak dalam senyap, PPATK telah membuktikan perannya dalam membantu membongkar dana kejahatan keuangan hingga puluhan triliun,” kata dia.

Sebelumnya, Sahroni juga meminta PPATK mulai memantau pergerakan keuangan partai-partai politik jelang Pemilu 2024. Dia meminta agar PPATK memeriksa keuangan semua partai tanpa terkecuali agar proses politik bersih dari dana hasil kejahatan.

“Boleh juga itu PPATK awasi kegiatan-kegiatan parpol menjelang pemilu. Ini berlaku untuk setiap partai, termasuk partai

saya (NasDem), bisa tolong dicek juga. Dengan begitu proses politik kita bisa bersih dari dana hasil kejahatan,” kata Sahroni, 20 Juli 2023.

Sahroni berharap PPATK mengawasi betul pergerakan dana ke dalam parpol, khususnya kemungkinan dana kejahatan. Dia menilai ini bisa berbahaya terhadap penyelenggaraan pemilu.

“PPATK harus ambil peran demi terwujudnya Pemilu 2024 berjalan adil dan

damai. Jangan sampai ada dana kejahatan yang dibiarkan mengintervensi pemilu. Bisa bahaya itu, (bisa) diacak-acak pemilu kita nanti,” ucap Sahroni.

Sahroni juga menyarankan agar PPATK selalu menjalin kerja sama serta kolaborasi dengan penegak hukum lainnya. Dia meminta Menko Polhukam Mahfud MD juga turut memback-up langkah PPATK tersebut.

“Tentu kalau ada temuan dana mencurigakan, kita tidak mungkin minta PPATK urus semuanya. Jadi hasil analisis PPATK bisa diserahkan ke lembaga-lembaga penegak hukum guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kita kan punya KPK, Polri, Kejaksaan yang selalu siap membantu. Teman-teman penyedia jasa keuangan juga pasti bantu terkait akses datanya. Apalagi ada Pak Menko Polhukam yang akan back-up,” ujar Sahroni.

Sementara itu, Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, menyatakan ada potensi politik uang atau money politic dengan menggunakan e-money dan e-wallet di tahun politik 2023 dan 2024. Pemerintah dan sektor kripto diminta mengantisipasi penyalahgunaan teknologi tersebut.

“PPATK menilai bahwa adanya potensi money politic dengan menggunakan e-money dan e-wallet,” ujar Ivan dalam agenda ‘4th Legal Forum U r -

gensi Regulatory Technology dan Digital Evidence dalam Mendukung Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme’ di Jakarta Pusat, Selasa, 7 November 2023.

Ivan menjelaskan salah satu hal yang menjadi kerentanan penggunaan e-money dan e-wallet adalah diperbolehkannya tidak dilakukannya know your customer atau customer due diligence terhadap transaksi dengan jumlah tertentu.

“Misalnya e-money untuk open loop dan e-wallet tanpa registrasi. Tidak adanya informasi profil yang memadai dan terverifikasi pada e-money dan e-wallet dimaksud akan menyulitkan otoritas, pengawas pemilu, intelijen, dan penegak hukum,” kata Ivan.

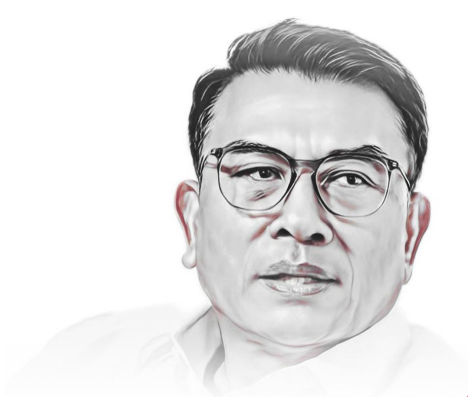
Dalam agenda ini, Ivan menegaskan pemerintah tidak harus menekan atau menghambat perkembangan teknologi finansial, meskipun hal itu menimbulkan ancaman tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Menurut Ivan, pemerintah perlu selangkah lebih maju atau one step forward dari para pelaku kejahatan melalui pengayaan pengetahuan dan kapabilitas mengenai jasa keuangan berbasis teknologi yang tengah dan akan dikembangkan oleh sektor privat, serta kolaborasi dengan asosiasi dan industri jasa keuangan.

Pemerintah juga perlu melakukan upaya mitigasi risiko melalui pembuatan smart regulation dan juga mendorong sektor privat untuk mengembangkan dan memanfaatkan regulatory technology.

“Salah satu kebijakan pemerintah yang responsif dan antisipatif dalam rangka mitigasi risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme adalah dengan menetapkan fintech sebagai pihak pelapor,” tutur Ivan.

Dia menjelaskan mitigasi risiko penetapan pihak-pihak tertentu sebagai pihak pelapor dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memiliki konsekuensi pihak-pihak dimaksud akan memiliki dua kewajiban utama, yaitu menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan menyapaikan laporan ke PPATK. “Kedua tugas utama dimaksud apabila dilaksanakan secara patuh, maka akan menjadi bukti iktikad baik dan akan melindungi pihak pelapor dari segala bentuk upaya pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan oleh pelaku kejahatan,” kata Ivan.



“Kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu dianggap sebagai pelanggaran, saya pikir masyarakat bisa komplain itu”

Moeldoko

AKTIVITAS ASN DIAWASI KETAT

► Dilarang Interaksi Media Sosial Peserta Pemilu

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas di masa Pemilu 2024. ASN dilarang menyukai (like) dan komen di akun media sosial capres-cawapres.

“**P**ara ASN diimbau untuk tidak berinteraksi dengan para capres-cawapres di media sosial, termasuk memberikan like dan komen/komentar di unggahan mereka. Juga tidak boleh share stiker di WA (WhatsApp),” kata Menteri PANRB, Abdulah Azwar Anas, Kamis, 9 November 2023.

Setelah acara demo layanan digital perizinan event di Kementerian PANRB, Azwar menjelaskan dirinya telah menandatangani kesepakatan dengan berbagai instansi terkait netralitas ASN menjelang pesta demokrasi yang berlangsung tahun depan.

“Soal netralitas ASN, sebelumnya kami telah melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), KPU (Komisi Pemilihan Umum), Pak Kapolri (Listyo Sigit Prabowo), Pak Mendagri (Tito Karnavian), dan juga pihak-pihak yang lain. Kami telah sepakat ASN harus netral,” terangnya.

Azwar juga telah menyiapkan sanksi untuk diterapkan kepada para ASN yang masih nekat melanggar aturan tersebut, yaitu berupa teguran hingga pidana.

“Kami telah mempunyai kesepakatan mana itu yang teguran ringan sampai nanti kepada pidana jika ASN melakukan pelanggaran berat,” ucap dia.

Sebelumnya pada 2 November 2023, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan beberapa strategi yang disiapkan pemerintah agar para ASN dapat tetap menjaga netralitas menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Beberapa strategi itu di antaranya pembuatan pakta integritas sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait netralitas dalam Pemilu hingga pemantauan langsung kepada para ASN di ruang digital.

Adapun SKB yang dimaksud mengacu pada SKB yang diresmikan pada 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam SKB tersebut, para ASN diminta untuk menandatangani pakta integritas yang salah satu syaratnya terkait dengan penggunaan media sosial, seperti tidak mem-follow atau menyukai konten dari akun media sosial para calon kontestan Pemilu.

ASN juga diminta untuk tidak menunjukkan komentar dukungan, bahkan menyebar kabar tidak benar mengenai Pemilu 2024 lewat kanal media sosial pribadi mereka.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan masyarakat bisa menga-

jukan komplain bila mendapati ASN yang bersikap tidak netral pada rangkaian Pemilu 2024.

“Kalau garisnya sangat jelas, Presiden sangat jelas berkali-kali mengatakan posisi TNI dan Polri sangat clear, tetapi kalau di bawah ada, umpamanya hal-hal yang menyimpang dari arahan Presiden, itu masyarakat bisa komplain,” kata Moeldoko.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi telah menegaskan sikap ASN pada Pemilu 2024 harus dalam posisi netral, termasuk jajaran TNI dan Polri. Namun, apabila muncul perilaku ASN yang menyimpang, masyarakat bisa menyampaikan komplain kepada otoritas terkait.

“Kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu dianggap sebagai pelanggaran, saya pikir masyarakat bisa komplain itu,” tambahnya.

Moeldoko mengatakan aktivitas ASN telah diatur dalam kebijakan garis komando pimpinan. Apabila melanggar, maka ada sanksi yang berlaku. “Tetapi kalau seandainya ada prajurit di bawah salah, melakukan sesuatu, ya, itu sanksinya cukup yang bersangkutan, karena bukan menjadi sebuah kebijakan garis komando,” tuturnya.

Moeldoko juga disinggung terkait netralitas Presiden Jokowi menjelang Pemilu 2024 yang kini menuai tanggapan beragam dari masyarakat.

“Sepanjang yang saya tahu, beberapa kali beliau berbicara dengan saya dan saya juga lapor kepada beliau bahwa Pak saya dalam posisi yang netral dalam pemilu kali ini. Ya sama, kita netral (Presiden bilang),” kata Moeldoko.

Netralitas Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024 menuai tanggapan beragam publik karena sempat menyinggung salah satu nama bakal calon presiden dalam sejumlah pidatonya. Selain itu, Jokowi juga kerap menyampaikan simbol-simbol tertentu yang mengarah pada salah satu bakal calon presiden.

Menurut Moeldoko, simbol-simbol yang disampaikan Presiden bersifat multitafsir dan tergantung dengan masyarakat yang mengartikan.

Moeldoko juga mengatakan bahwa anggota Kabinet Indonesia Maju tidak menggunakan sarana dan prasarana pemerintah untuk kepentingan politik praktis Pemilu 2024.

“Walaupun beliau-beliau ada di kementerian, dari sisi politik praktisnya, kita semuanya berharap tidak lagi menggunakan seluruh jajarannya, lembaganya, untuk kepentingan politik praktis itu karena itu sudah jelas diatur dalam undang-undang. Tidak boleh menggunakan sarana dan prasarana,” kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan bahwa anggota kabinet saat ini memang warna-warni dalam menentukan dukungan politik pada Pemilu 2024. Meski demikian, Istana ingin memastikan seluruh anggota kabinet tetap bekerja secara efektif dan tidak mengurangi kinerja untuk pelayanan publik.

Demikian halnya dengan TNI dan Polri. Dua institusi pertahanan dan keamanan itu juga telah diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Masyarakat dapat mengevaluasi dan mengkritisi TNI/Polri jika ditemukan indikasi tidak netral dalam Pemilu 2024.

“Masyarakat punya keleluasaan untuk mengevaluasi, mengkritisi, bahkan ya apa itu, lebih keras lagi mungkin melihat netral atau tidak TNI/Polri itu. Saya pikir instrumen untuk pengawasan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat,” kata mantan Panglima TNI itu.

Jajaran TNI dan Polri, kata Moeldoko, juga tidak boleh menggunakan sarana dan prasarana untuk kepentingan politik praktis. Masyarakat sipil dapat mengawasi netralitas TNI dan Polri dalam Pemilu 2024 demi terjaganya demokrasi.

“Itu sudah ada aturannya, apalagi memengaruhi bawahannya untuk berpolitik praktis. Itu sungguh tidak boleh. Jelas aturannya sudah ada. tinggal kita kuat kontrolnya sebagai sebuah negara demokrasi,” kata Moeldoko.

Di sisi lain, Menteri

Dalam Negeri Tito Karnavian juga mewanti-wanti agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersikap netral menjelang Pemilu 2024.

“KPU di tingkat pusat memang cuma komisionernya berapa orang, tapi jejaringnya sampai ke tingkat bawah melibatkan hampir 2 juta orang kalau saya tidak salah, bagaimana membuat 2 juta kepala menjadi netral pada satu posisi yang sama, cara berpikirnya yang sama ingin membuat pemilu yang bagus, yang netral,” kata Tito.

Tidak hanya KPU, dia juga menegaskan agar DKPP dan Bawaslu yang bertindak sebagai pengawas harus bersikap netral. Kedua lembaga ini diharapkan mampu menjadi wasit yang baik dan kredibel.

Menurutnya, Pemilu 2024 adalah waktu yang tepat bagi para penyelenggara untuk menyamakan persepsi dan memahami tantangan yang akan dihadapi.

“DKPP memang kredibel, saya paham betul beliau yang ada di depan ini orang-orang yang sangat kredibel, dan kemarin sudah diangkat ada tim pemeriksa daerah, tantangannya adalah bagaimana agar tim pemeriksa daerah ini pemikirannya sama dengan para pimpinan komisioner DKPP yang reputasinya baik,” ujarnya.

Melihat tantangan yang tidak mudah, dia meminta kepada semua pihak untuk tetap mengawal proses jalannya pemilu. Pasalnya, pemilu merupakan momen penting bagi negara demokrasi.

Untuk itu, Tito mengimbau KPU bersama DKPP dan Bawaslu berkerjasama mengawasi pemilu.

“Pilkada harus jalan terus apa pun hambatnya, apa pun tantangannya, kita maksimal, tidak akan ada yang sempurna, apalagi menyamakan pemikiran manusia, tidak akan pernah sama,” jelas Tito.

Tak hanya itu, dia juga berpesan agar kolaborasi antara DKPP dan Bawaslu berjalan optimal. Dengan demikian, keduanya mampu mengatasi berbagai macam potensi konflik saat proses pemilu berlangsung. ●RDO



“Kemungkinan selain mendapatkan kursi di kabinet apabila Prabowo dan Gibran memenangkan Pilpres 2024, Partai Gelora akan memperoleh suara yang melampaui ambang batas parlemen, sehingga berhasil menempatkan kadernya di DPR”

Fernando Emas



GELORA PASANG BADAN BUAT GIBRAN

Gibran Rakabuming Raka terus mendapatkan serangan dari berbagai pihak pasca ditetapkan sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan, PDIP sekarang ini sudah mulai terang-terangan menyerang putra sulung Presiden Joko Widodo itu.

Adapun isu yang disematkan kepada Gibran adalah dinasti politik. Tidak hanya itu, Gibran juga dianggap sebagai kader yang tidak loyal kepada partai pimpinan Megawati Soekarnoputri. Padahal, Gibran menjadi Wali Kota Solo atas dorongan dari PDIP.

Serangan bertubi-tubi yang menghantam Gibran membuat Partai Gelora bereaksi. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyampaikan pembelaannya untuk Gibran.

Dia menyampaikan, tuduhan dinasti politik yang dihadapkan kepada Gibran karena maju sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu tidak berdasar. Dia merasa aneh ketika hanya Gibran yang dipersoalkan dengan masalah dinasti politik.

Padahal, kata Fahri, Pemilu ataupun Pilpres merupakan ajang bagi seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilihnya untuk memilih figur atau calon pemimpin di masa depan. Hal itu tidak berkaitan dengan dinasti politik.

“Kalau orang memilih Pak Mahfud, orang memilih Anies, kenapa orang enggak boleh memilih Gibran?” kata Fahri dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk ‘Suhu Politik Pasca Putusan MK’ secara daring di Jakarta, Sabtu, 4 November 2023.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu juga tidak sepakat dengan tuduhan yang menyasar kepada Gibran yang disebut melanggengkan kekuasaan dalam sistem demokrasi. Dikatakan Fahri, di sistem demokrasi, rakyatlah yang menjadi penentu. Sebab, kedaulatan berada di tangan rakyat.

“Apakah hak warga negara harus dipotong karena dia adalah anak pejabat dalam demokrasi yang pada dasarnya

nominasi oleh rakyat dan pemilihan oleh rakyat,” jelas Fahri.

Fahri berkaca pada Pilkada di Kota Tangerang Selatan yang diikuti anaknya Wakil Presiden Ma'ruf Amin, namun kalah dengan pasangan Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruhnya jika seorang anak pejabat mengikuti konstitusi. Jadi, tidak ada yang perlu dipersoalkan jika Gibran mengikuti Pilpres 2024 yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.

“Ada banyak anak-anak pemimpin pada masa lalu yang dikalahkan oleh rakyat. Keponakan Pak JK (di Makassar) kalah sama kotak kosong, anak Ma'ruf Amin di Tangerang (Selatan) dikalahkan. Kan kalah, jadi akhirnya jangan kemudian takut bertarung,” jelas Fahri.

Sementara itu, Direktur Rumah Politik, Fernando Emas, menilai wajar jika PDIP menyerang Gibran dan Presiden Jokowi. Sebab, PDIP kecewa dengan sikap politik dua tokoh tersebut. Pasalnya, seluruh kader PDIP akan mendukung penuh pencalonan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Namun, di sisi lain, Gibran dan Presiden Jokowi malah membelot ke Koalisi Indonesia Maju.

“Karena dianggap tidak memberikan pendidikan politik dan etika politik dalam perpolitikan di Indonesia. Bagaimana seorang Gibran tidak menunjukkan suatu keputusan,” jelas Fernando.

Dikatakan Fernando, sikap yangunjukkan Gibran itu seolah-olah sudah tidak lagi menghormati PDIP

yang sudah membesarkannya selama ini. Hal itu yang membuat PDIP geram dan kecewa dengan Gibran dan Presiden Jokowi.

“Seolah ingin menunjukkan kepongahan-nya. Jokowi juga sangat membuat kecewa PDIP Perjuangan dan Megawati. Sehingga, mendapatkan serangan dari PDIP Perjuangan,” ujar Fernando.

Meski dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi selalu ingin menunjukkan akan bersikap netral pada pilpres 2024. Kendati begitu, publik sudah terlanjur tidak percaya. Menurutnya, Presiden Jokowi akan sulit mengembalikan kepercayaan rakyat. Sebab, Presiden Jokowi seolah-olah membiarkan Gibran terus melenggang di 2024.

“Publik tidak akan percaya karena tidak akan mungkin Jokowi membiarkan anaknya berjuang sendiri,” kata Fernando.

Selain itu, masyarakat sudah menganggap Presiden Jokowi melalui anaknya akan melanggengkan kekuasaannya. Apalagi, isu Jokowi meminta penundaan Pemilu dan perpanjangan jabatan hingga tiga periode diungkap oleh para elite PDIP.

“Hal tersebut didasari oleh upaya Jokowi yang seolah enggan melepaskan kekuasaannya dengan melakukan upaya penundaan pemilu dan membuka peluang masa jabatan presiden tiga periode,” terang Fernando.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menempatkan orang-orang yang dikenal dekat dengannya pada saat menjabat sebagai wali kota Solo menduduki jabatan strategis seperti Panglima TNI yang akan diisi oleh Jenderal Agus Subiyanto.

Maka akan sangat diragukan netralitas TNI pada Pemilu dan Pilpres 2024 karena Jokowi dianggap bukan sekadar cawe-cawe. Namun, akan sangat mungkin me-

manfaatkan alat negara dan para pejabat kepala daerah untuk membantu kemenangan pasangan Prabowo dan Gibran.

“Sangat mungkin PDI Perjuangan sudah membaca tentang adanya kemungkinan itu, sehingga melakukan serangan kepada Gibran dan Jokowi,” tutur Fernando.

Lebih lanjut, Fernando menyampaikan, pembelaan yang dilakukan Partai Gelora ini tentu akan mendapatkan kompensasi dari Prabowo dan Gibran jika terpilih menjadi presiden periode 2024-2029.

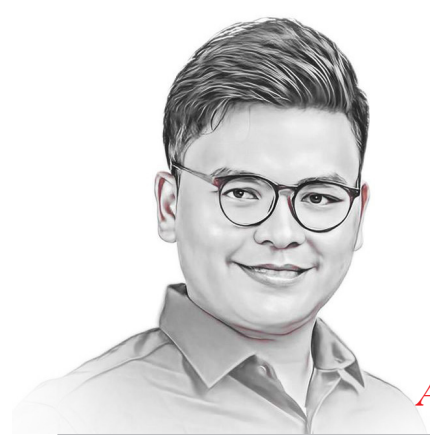
“Kemungkinan selain mendapatkan kursi di kabinet apabila Prabowo dan Gibran memenangkan Pilpres 2024, Partai Gelora akan memperoleh suara yang melampaui ambang batas parlemen, sehingga berhasil menempatkan kadernya di DPR,” kata Fernando.

Dengan adanya kompensasi yang sangat menjanjikan, lanjut Fernando, maka Partai Gelora akan dengan senang hati menjadi tameng bagi Gibran dan Jokowi.

Sehingga, perlu bagi partai politik yang tidak tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk menjaga dan mengawal suaranya sampai ditetapkan oleh KPU. Antisipasi adanya kemungkinan intervensi dan intimidasi terhadap kader dan juga para saksi partai politik dan pengawas baik dari tingkat TPS sampai pada tingkat KPU.

“Haus kekuasaan akan membuat seseorang melakukan berbagai upaya untuk bisa meraih kemenangan,” tandas Fernando. ●RDO





“Saya kira tentu (tegak lurus ke Jokowi). Golkar ini partai pemerintah. Karena Partai Golkar sudah mengukung Prabowo Subianto”

Arifki Chaniago

INFO PARTAI

Minggu II • November 2023

23

GOLKAR TEGAK LURUS KE JOKOWI

Partai Golkar menyatakan akan tetap konsisten mendukung dan mengawal pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin hingga masa jabatannya berakhir.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menegaskan, partai beringin akan selalu konsisten membantu Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia.

“Konsistensi Golkar untuk membangun negeri telah kami tunjukkan, kami telah mengawal kepemimpinan Bapak Presiden selama dua periode,” kata Airlangga di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin, 6 November 2023.

Tidak hanya itu, Partai Golkar juga akan memastikan kebijakan yang telah dibuat oleh Presiden Jokowi dapat berjalan dengan baik. Golkar telah berkomitmen mengawal seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam membangun Bangsa Indonesia menjadi negara maju di 2045.

“Golkar berperan aktif memastikan arahan dan kebijakan Bapak Presiden dapat dijalankan sebaik-baiknya,” tutur Airlangga.

Dia menuturkan, visi dan misi antara Partai Golkar dengan Presiden Jokowi tidak jauh berbeda. Sebab, Partai Golkar bercita-cita Indonesia bisa menjadi negara maju di 2045, sebagaimana yang diinginkan dan diharapkan oleh Presiden Jokowi.

“Golkar berpandangan program Bapak Presiden Jokowi memiliki kesamaan dengan arah perjuangan Partai Golkar,” kata Airlangga.

Menteri Koordinator Perekonomian itu mengatakan, Partai Golkar menjadi partai yang sangat konsisten mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Selama dua periode, Partai Golkar terus mendukung Jokowi.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, mengatakan, partai beringin dapat dipastikan akan tegak lurus bersama Presiden Jokowi. Sebab, Partai Golkar selama berada di pemerintahan Presiden Jokowi selalu mendapatkan tempat yang be-
gi-

tu strategis.

Selain itu, Partai Golkar juga rela meninggalkan PPP yang lebih memilih mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ketimbang pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

“Saya kira tentu (tegak lurus ke Jokowi). Golkar ini partai pemerintah. Karena Partai Golkar sudah mengukung Prabowo Subianto,” kata Arifki kepada Info Indonesia, Sabtu, 11 November 2023.

Tegak lurusnya Partai Golkar terhadap Presiden Jokowi juga terlihat ketika mendukung Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Hal ini membuktikan bahwa Partai Golkar tidak bisa lepas dari tangan dingin Presiden Jokowi.

“Apalagi dengan adanya Gibran, makin memperkuat daya tawar Golkar untuk rangkul Gibran atau Bobby,” kata Arifki.

Dia mengungkapkan, Partai Golkar yang tegak lurus dengan Presiden Jokowi pastinya akan sangat mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Sebab, Partai Golkar sudah memiliki mesin politik yang cakap dalam menghadapi pertarungan politik. Apalagi, situasi hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDIP saat ini sedang memanas.

Hal ini bisa menjadi keuntungan bagi Partai Golkar yang se-

lalu setia dengan Presiden Jokowi.

“Saya kira Golkar kuat di mesin calegnya. Sebagai partai penguasa tentu diuntungkan. Apalagi, dengan renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP,” jelas Arifki.

Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, menilai, dukungan yang diberikan partai beringin kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 sudah menunjukkan kesetiaan Golkar dengan Presiden Jokowi.

“Jadi Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga saya kira tetap berada di barisan Prabowo-Jokowi,” kata Yusak kepada Info Indonesia.

Dekan FISIP Universitas Pamulang itu menyampaikan, kesetiaan Partai Golkar dengan Presiden Jokowi juga akan terus terjalin jika pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa memenangkan Pilpres 2024. Dikatakan Yusak, hubungan Partai Golkar dan Presiden Jokowi adalah simbiosis mutualisme.

“Jika Prabowo memenangkan Pilpres, Golkar tetap membutuhkan Jokowi,” ujar Yusak.

Yusak menambahkan, positioning Jokowi sebagai king maker di Pilpres 2024 tentu memiliki andil pasca

pemilu atau pasca terbentuknya pemerintahan di tahun depan. Pasca lengser, Jokowi berkepentingan agar program-programnya bisa dilanjutkan oleh presiden-wakil presiden terpilih.

“Jokowi berpotensi ikut memegang kendali kekuasaan jika Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres,” kata Yusak.

Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, juga meyakini partai pimpinan Airlangga Hartarto itu akan tetap tegak lurus dengan Presiden Jokowi. Hal itu diketahui setelah Partai Golkar akan membuka diri kepada keluarga Jokowi yang ingin menjadi keluarga besar partai beringin tersebut.

“Terlihat dari gelagat Golkar membuka pintu sangat lebar bagi keluarga Jokowi,” kata Iwan.

Apalagi, Partai Golkar merupakan partai yang pertama kali mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ini pun bisa mengindikasikan bahwa Partai Golkar memang sangat ke-Jokowi-an.

Dia menuturkan, dukungan all out yang diberikan Partai Golkar terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Jokowi pastinya mengharapakan dampak yang positif. Iwan menilai, Partai Golkar sangat berharap besar dari coattail effect yang diberikan Gibran maupun Jokowi di Pemilu 2024.

“Tentu Golkar berharap sikap politiknya ini dapat berdampak pula pada coattail effect Gibran dan Jokowi pada 2024,” jelas Iwan.

Dia mengatakan, sebagai partai yang mengukung pertama kali Gibran sebagai cawapres, tentu partai beringin sangat diuntungkan. Dia menambahkan, dukungan Partai Golkar yang begitu besar kepada Gibran dan Jokowi pastinya nantinya akan diganjar dengan keuntungannya di kursi kabinet.

“Salah satunya bisa jadi soal jumlah kursi menteri di Kabinet jika Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024,” tandas Iwan. ●RDO



“Gerindra menikmati coat-tail effect dari pencapresan Prabowo, hingga akhirnya berhasil menyalip PDIP dan berada pada posisi unggul”

Vivin Sri Wahyuni



GERINDRA PASTI SALIP PDIP

Partai Gerindra kini menjadi ancaman terbesar bagi PDIP untuk kembali meraih kemenangan pada Pemilu 2024. Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, elektabilitas partai banteng kini mulai disalip oleh partai berlambang kepala garuda.

Lembaga survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research menunjukkan Gerindra kini unggul tipis atas PDIP dengan elektabilitas mencapai 16,7 persen. PDIP berada di bawah Gerindra dengan elektabilitas 16,3 persen.

Menurut Direktur Eksekutif indEX Research, Vivin Sri Wahyuni, keberhasilan Gerindra menyalip PDIP adalah berkat coat-tail effect (kecenderungan seorang pemimpin partai politik populer untuk menarik suara kandidat lain) Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden.

“Gerindra menikmati coattail effect dari pencapresan Prabowo, hingga akhirnya berhasil menyalip PDIP dan berada pada posisi unggul,” kata Vivin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 8 November 2023.

Vivin menjelaskan, korelasi antara pencapresan dengan dukungan terhadap partai pengusung memperlihatkan bekerjanya coattail effect. Seiring dengan merosotnya kekuatan PDIP dan Ganjar Pranowo yang diusung sebagai capres, terjadi pergeseran arah dukungan Presiden Joko Widodo terhadap para capres.

Jokowi tampak membagi dukungan, di mana sebelumnya condong kepada Ganjar, kemudian beralih mengendorse Prabowo. Hasilnya, elektabilitas Prabowo bergerak naik, diikuti pula dengan kenaikan elektabilitas Gerindra sebagai pengusung utamanya.

Menurut Vivin, rivalitas antara PDIP dan Gerindra menarik untuk dicermati terutama jelang tahun politik 2024.

“Meskipun Prabowo dan Gerindra menjadi lawan politik Jokowi dan PDIP pada dua pemilu, tetapi keduanya pernah memiliki sejarah persekutuan yang erat dan kini sama-sama memerintah,” ujarnya.

PDIP yang berpengalaman sebagai oposisi selama dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pernah sama-sama mengajukan pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2009, Megawati yang berpasangan dengan Prabowo mengalami kekalahan dalam Pilpres tersebut.

Jalanan koalisi PDIP dan Gerindra pula yang menghadirkan Jokowi di pentas politik nasional, ketika mantan wali

kota Solo itu diboyong untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2012. Namun, seiring gesekan yang muncul, kedua kekuatan politik itu kemudian mengambil jalan berseberangan.

Setelah pertarungan pada Pemilu 2014 dan 2019, Prabowo kemudian memutuskan bergabung dalam pemerintahan Jokowi periode kedua. Gerindra pun berbalik posisi, dari oposisi terhadap pemerintah kini menjadi barisan pendukung kuat pemerintahan.

Kuatnya dukungan terhadap Prabowo menaikkan suara dan perolehan kursi Gerindra di Senayan, menggeser Golkar yang biasanya menjadi runner-up.

“Kini dengan terus menguatnya Prabowo, Gerindra mengintip peluang naik ke peringkat pertama mengalahkan PDIP,” ujar Vivin.

Dia menilai hal tersebut akan menjadi tantangan serius bagi PDIP yang bertekad untuk mencetak hat-trick atau menang pemilu tiga kali berturut-turut pada Pemilu 2024. Rivalitas yang muncul di antara kubu Ganjar dan Prabowo juga dilandasi oleh dinamika tersebut.

“Sebagai sesama partai pendukung pemerintah, punya sejarah berkoalisi, bahkan berjasa mengorbitkan Jokowi di ibu kota, kedua partai kini memperebutkan posisi paling unggul hingga bisa menentukan jalannya pemerintahan pasca-Jokowi,” tutur Vivin.

Menguatnya elektabilitas Prabowo juga dibuktikan dengan mengalirnya dukungan dari partai-partai besar, yang notabene meraih elektabilitas tinggi. Golkar yang melebur ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih menempati peringkat ketiga dengan elektabilitas 8,5 persen.

Lalu, ada Demokrat yang sebelumnya berada di barisan oposisi kini juga bergabung ke kubu Prabowo, memiliki elektabilitas 7,1 persen. Partai-partai pengusung Prabowo lainnya adalah PAN (2,8 persen), Gelora (1,2 persen), PBB (0,5 persen), dan Garuda (0,0

persen).

Selain PDIP, Ganjar hanya didukung oleh PPP (2,0 persen), Perindo (1,6 persen), dan Hanura (0,2 persen).

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang semula mendukung Ganjar kini berpindah ke kubu Prabowo, elektabilitasnya mencapai 6,7 persen. Masuknya Kaesang Pangarep sebagai ketua umum PSI juga menambah energi bagi partai yang mengunggulkan anak-anak muda. Kakaknya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang kini terpilih sebagai cawapres bagi Prabowo.

PKB yang sejak awal mengusung Prabowo dan justru beralih mendukung Anies Baswedan elektabilitasnya 7,5 persen. Anies juga didukung oleh partai oposisi PKS (4,5 persen) dan partai pemerintah lainnya yakni Nasdem (2,1 persen).

Sisanya adalah Partai Ummat (0,4 persen), lalu PKN dan Buruh yang masing-masing nihil dukungan, serta masih ada 21,9 persen yang menyatakan tidak tahu/tidak menjawab.

Dalam survey indEX Research juga menunjukkan elektabilitas capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mencapai 50,4 persen dalam simulasi tiga pasangan dan berpeluang menang satu putaran.

Dalam survei tersebut pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meraih elektabilitas 26,0 persen, sedangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar meraih 16,8 persen. Sisanya 6,8 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Menurut Vivin, dengan capaian elektabilitas salah satu pasangan lebih dari 50 persen, Pilpres 2024 bisa jadi hanya akan berlangsung satu putaran. Hal

itu sekaligus menghapus kekhawatiran akan berlarut-larutnya proses politik jika Pilpres harus berlangsung melalui dua putaran.

Dia menilai

masuknya Gibran sebagai cawapres Prabowo memberikan energi luar biasa hingga mendorong elektabilitas dalam simulasi tiga pasang capres-cawapres.

“Pendukung capres lain dalam survei-survei sebelumnya beralih ke Prabowo-Gibran,” kata Vivin.

Hal serupa kurang terlihat oleh Mahfud maupun Cak Imin, yang praktis mengalami stagnasi ketika dipasangkan dengan figur capres masing-masing.

“Prabowo-Gibran menjadi magnet bagi pemilih yang lebih luas dibandingkan pasangan Ganjar maupun Anies. Gibran yang diragukan sebagian kalangan karena usianya masih sangat muda ternyata bisa mengimbangi ketokohan Mahfud dan Cak Imin yang malang-melintang di lembaga tinggi negara dan kepartaian,” lanjut Vivin.

Vivin juga membahas soal kehadiran sosok Gibran sebagai cawapres Prabowo menimbulkan kontroversi karena didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi menjelang pendaftaran ke KPU.

“Konteks yang harus dilihat adalah bahwa berpasangannya Gibran dengan Prabowo menunjukkan keseriusan Jokowi mengendorse Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024, di mana PDIP bersikeras mencalonkan Ganjar meskipun berisiko mengalami kekalahan,” kata Vivin.

Tudingan bahwa putusan MK hanya menguntungkan Gibran juga tidak beralasan, karena putusan itu membuka terobosan bagi banyak sekali anak-anak muda yang berpengalaman sebagai penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilu, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

“Putusan MK membolehkan capres atau cawapres berusia di bawah 40 tahun

dengan latar belakang sebagai kepala daerah maupun anggota parlemen di semua jenjang, baik DPR RI dan DPD maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Vivin.

Jika 10 persen saja dari para penyelenggara negara tersebut merupakan anak muda, ada ribuan orang yang berhak maju dalam kontestasi Pilpres.

“Ada syarat lain yang lebih krusial yaitu diusung oleh partai politik, tetapi pada prinsipnya MK telah memberikan peluang yang luas,” terang Vivin.

Seperti halnya kehadiran Jokowi dalam pentas politik nasional telah memberikan peluang bagi orang biasa di luar trah elite partai, kemunculan Gibran juga mendobrak sistem politik yang didominasi oleh kalangan politisi tua.

“Fakta bahwa Indonesia tengah mengalami bonus demografi dan besarnya jumlah pemilih milenial dan gen Z mendasari lahirnya tokoh-tokoh muda dalam perhelatan politik, yang kemudian memungkinkan Gibran untuk maju pada kancah yang lebih strategis,” kata Vivin. •RDO

